

PENDAHULUAN

PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara mengakui pentingnya tata kelola perusahaan yang baik, karena merupakan faktor kunci bagi semua pemangku kepentingan dalam mencapai efisiensi perusahaan. Oleh karena itu, PT. BPD Sultra akan terus mengelola usahanya sesuai dengan prinsip-prinsip Good Corporate Governance yang memberikan dasar dalam mencapai kinerja berkualitas tinggi, posisi keuangan yang kuat dan stabil serta pertumbuhan yang berkelanjutan. Kebijakan Tata Kelola Perusahaan akan memberikan arah dan kerangka kerja dalam mengelola dan memantau Bank sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

Laporan Pelaksanaan GCG merupakan bentuk transparansi kondisi keuangan dan non keuangan kepada publik sesuai dengan PBI No. 8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 sebagaimana telah diubah dengan PBI Nomor 8/14/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 serta Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 9/12/DPNP tanggal 30 Mei 2007 tentang Pelaksanaan GCG Bagi Bank Umum sebagaimana telah diubah dengan SEBI Nomor 15/15/DPNP tanggal 29 April 2013 tentang Pelaksanaan GCG Bagi Bank Umum. yang mewajibkan Bank-Bank agar dalam melaksanakan kegiatan usahanya berpedoman pada prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*, serta melakukan *self assessment* terhadap kecukupan pelaksanaan *Good Corporate Governance* dan menyusun laporan pelaksanaannya.

Visi PT. BPD Sultra adalah menjadi bank terkemuka (*Regional Champion*) di Wilayah Sulawesi Tenggara. Oleh sebab itu, maka PT. BPD Sultra akan terus berusaha memberikan layanan keuangan berkualitas sesuai dengan kebutuhan nasabah, dan dilengkapi dengan sumber daya manusia yang berkualitas serta teknologi dan sistem kerja yang memadai. Untuk mencapai visi tersebut, PT. BPD Sultra telah menetapkan kebijakan tata kelola perusahaan sesuai dengan lingkungan ekonomi dan sosial di Sulawesi Tenggara.

Sejak perubahan bentuk badan hukum PD. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara menjadi Perseroan Terbatas dengan nama PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara atau disebut Bank Sultra sesuai Akta Pendirian PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara Nomor 107 tanggal 21 Agustus 2013 serta Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No.15/109/KEP.GBI/2013 tanggal 18

November 2013 perihal Pengalihan Izin Usaha dari PD. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara menjadi PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara, maka PT. BPD Sultra tetap berkomitmen dalam peningkatan kinerja dengan tetap memperhatikan dan melindungi kepentingan seluruh *Stakeholder*, senantiasa memastikan aktivitas bank telah berjalan sesuai aturan dan prinsip-prinsip manajemen, kontrol dan pendelegasian tanggung jawab serta senantiasa menerapkan tata kelola perusahaan dengan berpedoman pada 5 (lima) prinsip dasar GCG, yaitu seperti Keterbukaan (*Transparency*), Akuntabilitas (*Accountability*), Pertanggungjawaban (*Responsibility*), Independen (*Independency*), dan Kewajaran (*Fairness*).

Sebagai bentuk perwujudan pelaksanaan penerapan *Good Corporate Governanace*, maka PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara membuat Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Tahun 2013 untuk memberikan informasi kepada para *stakeholder* dan merupakan salah satu bentuk kepatuhan PT. BPD Sultra pada peraturan yang berlaku. Dalam laporan ini *assesment* GCG dikelompokkan dalam suatu *governance system* yang terdiri dari 3 (tiga) aspek *governance*, yaitu *governance structure* yang bertujuan untuk menilai kecukupan struktur dan infrastruktur, *governance process* yang bertujuan untuk menilai efektifitas proses pelaksanaan prinsip GCG yang didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur, dan *governance outcome* yang bertujuan untuk menilai kualitas *outcome*.

Pelaksanaan *Good Corporate Governance* pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara Tahun 2013 tertuang dalam laporan berikut :

STRUKTUR TATA KELOLA PERUSAHAAN

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Pada tanggal 26 Februari 2014 bertempat di Hotel Grand Clarion Kendari telah dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahun Buku 2013 dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara.

Kesimpulan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara Tahun Buku 2013 :

1. Mengesahkan dan menyetujui Neraca dan Perhitungan Laba Rugi PT. BPD Sultra Tahun Buku 2013 yang telah diaudit Akuntan Publik yang ditutup dengan Total Aset sebesar Rp.3.124.330.970.179,- dan Laba bersih setelah Pajak sebesar Rp.113.497.655.451,-.
2. Mengesahkan dana setoran modal sebesar Rp.26.414.000.000,- menjadi modal disetor.
3. Pembagian jasa produksi tahun buku 2013 sebesar 15% yang diperuntukkan untuk Pengurus 2.5% dan untuk Pegawai 12.5%.
4. Yayasan Kesejahteraan BPD Sultra yang selama ini dibekukan dapat diaktifkan kembali dan Dana Kesejahteraan Sosial dari hasil laba tahun buku 2008 s/d tahun 2013 yang selama ini tersimpan pada pembukuan Bank pos rupa-rupa kewajiban dapat dipindahkan untuk penambahan modal yayasan sebagai komponen cadangan.
5. Remunerasi dan fasilitas yang akan diberikan kepada Pengurus PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara, terdiri dari :

- a. Penghasilan dan Fasilitas Direksi

Tabel 1.

Penghasilan dan Fasilitas Direksi

No	Jenis Penghasilan	Putusan RUPS	Keterangan
1	Gaji	Gaji = Gaji Dasar x Faktor Penyesuaian Industri x Faktor Penyesuaian Inflasi x Faktor Jabatan Penyesuaian Industri ditetapkan	Gaji dasar dan penyesuaian inflasi mengacu pada ketentuan Menteri BUMN

		sebesar 120% Faktor Jabatan untuk Direksi sebesar 90% dari Direktur Utama	No. PER-07/MBU/2010
2	Tunjangan		
	- Tunjangan hari keagamaan	Maksimal 2 kali gaji	
	-Tunjangan Komunikasi	At cost	Sebesar pemakaian
	- Santunan Purna Jabatan	Premi asuransi maksimal 25% dari gaji dalam 1 tahun	
	-Tunjangan Pakaian Dinas	Disesuaikan dengan kondisi dan ditetapkan dalam RKA	
	- Tunjangan Cuti Tahunan	Maksimal 1 kali gaji	
	-Tunjangan Perumahan	Maksimal 10% dari gaji	Hanya diberikan apabila Bank tidak menyediakan fasilitas rumah dinas
3	Fasilitas		
	-Kendaraan Dinas	Disesuaikan dengan kondisi dan ditetapkan dalam RKA	
	-Penggantian biaya kesehatan	Mengacu SK Direksi No.136/Kpts.DIR.BPD/2012	
	- Bantuan Hukum	Sesuai dengan kewajaran	Dalam hal terjadi tindakan/perbuatan untuk dan atas nama jabatannya.

	- Rumah Jabatan	Sesuai dengan kewajaran	
	-Biaya Representase	75% dari jumlah gaji direksi selama 1 tahun	
4	Tantiem		
	- Jasa Produksi	Sebesar 2.5% dari laba bersih setelah diaudit	
	- Bonus	Disesuaikan dengan target kinerja (maksimum 3 kali penghasilan)	Secara keseluruhan untuk pengurus

b. Penghasilan dan fasilitas Komisaris

Tabel 2

Penghasilan dan Fasilitas Komisaris

No	Jenis Penghasilan	Putusan RUPS	Keterangan
1	Honorarium	Komisaris Utama sebesar 75% dari gaji Direktur Utama dan untuk Komisaris sebesar 90% dari Komisaris Utama	
2	Tunjangan		
	-Tunjangan hari keagamaan	Maksimal 2 kali gaji	
	-Tunjangan Komunikasi	5% dari honorarium perbulan	Pemakaian <i>mobile phone</i>
	-Santunan Purna Jabatan	Premi asuransi maksimal 25% dari gaji dalam 1 tahun	
	- Tunjangan Pakaian Dinas	Disesuaikan dengan kondisi dan ditetapkan dalam RKA	

3	Fasilitas		
	- Kendaraan Dinas	Disesuaikan dengan kondisi dan ditetapkan dalam RKA	
	-Penggantian biaya kesehatan	Mengacu ketentuan bank dan dituangkan dalam RKA	
	- Bantuan Hukum	Sesuai dengan kewajaran	Dalam hal terjadi tindakan/perbuatan untuk dan atas nama jabatannya.
4	Tantiem		
	- Jasa Produksi	Sebesar 2.5% dari laba bersih setelah diaudit	

c. Remunerasi dan fasilitas dimaksud pada point a dan b diatas akan dituangkan dalam bentuk Keputusan Gubernur.

6. Penambahan setoran modal secara konsisten dari Pemegang Saham sehubungan dengan program BPD Regional Champion .
7. Usulan penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Tahun 2014 dilakukan oleh Dewan Komisaris
8. Aktiva dan Inventaris yang bukti kepemilikannya tidak ditemukan lagi agar dihapus buku.
9. Penjualan aset Bank baik Aktiva Tetap maupun barang kompensasi diatas Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) harus dengan persetujuan RUPS.
10. Penjualan barang kompensasi Aleang (Alm) dengan harga Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah).
11. Perubahan Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara.
12. Pembangunan gedung baru Kantor PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara 14 (empat belas) lantai.

Sedangkan Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara, mengusulkan dan memutuskan :

- Menyetujui dan mengesahkan Kabupaten Kolaka Timur dan Kabupaten Konawe Kepulauan sebagai pemegang saham baru PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara.
- Memberhentikan dengan hormat masing-masing Saudara H. Zainal Abidin selaku Komisaris Utama dan Saudara Budiman Junus selaku Direktur Pemasaran PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara.
- Mengangkat Saudara Lawang M.Siagian dan Saudari Hj.Rukaya Thamrin masing-masing sebagai calon Komisaris Utama dan Komisaris dengan masa bakti selama 3 (tiga) tahun
- Mengangkat Saudara Depid sebagai calon Direktur Pemasaran dengan masa bakti selama 4 (empat) tahun.

Selanjutnya pengangkatan pengurus baru akan efektif berlaku setelah dinyatakan lulus *Fit and Proper Test* oleh Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia, sehingga susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan nantinya menjadi:

- Direktur Utama : H. Khaerul Kemala Raden
- Direktur Umum : Hj. Hayati Hasan
- Direktur Pemasaran : Depid
- Direktur Kepatuhan : H. La Utu
- Komisaris Utama : Lawang M. Siagian
- Komisaris : H. Jahja Mallisa
- Komisaris : H. Suma Sanggo
- Komisaris : Hj. Rukaya Thamrin

A. PENGUNGKAPAN PELAKSANAAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* (GCG)

1. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS

a. Jumlah, komposisi, kriteria dan independensi anggota Dewan Komisaris

1. Dewan Komisaris adalah organ yang bertanggung jawab untuk mengawasi Direksi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Keanggotaan Dewan Komisaris PT. BPD Sultra telah sesuai regulasi Bank Indonesia, memenuhi ketentuan tentang Fit and Proper Test yang ditetapkan Bank Indonesia, larangan rangkap jabatan, dan Keberadaan Komisaris Independen.

2. Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 382 Tahun 2012 tanggal 24 September 2012 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua dan Anggota Dewan Pengawas BPD Sulawesi Tenggara, susunan Dewan Pengawas BPD Sultra adalah sebagai berikut :

- Ir. H. Zainal Abidin, MM : Ketua Dewan Pengawas merangkap Anggota Non Independen
- Drs. H. Jahja Mallisa : Anggota Dewan Pengawas Independen
- Drs. H. Suma Sanggo : Anggota Dewan Pengawas Independen

Selanjutnya dengan perubahan bentuk badan hukum dari PD. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara menjadi PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara, maka susunan Komisaris PT. BPD Sultra per 31 Desember 2013 sesuai dengan Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 696 Tahun 2013 tanggal 27 November 2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisaris PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara menjadi :

- Ir. H. Zainal Abidin, MM : Komisaris Utama
- Drs. H. Jahja Mallisa : Anggota Dewan Komisaris
- H. Suma Sanggo : Anggota Dewan Komisaris

Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No.8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bank Umum sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/14/PBI/2006, menetapkan bahwa setiap anggota Dewan Komisaris Independen ditetapkan paling kurang 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris. Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, hubungan kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kewenangannya untuk bertindak independen.

Terkait pemenuhan hal tersebut, anggota Dewan Komisaris telah mengungkapkan dalam Surat Pernyataannya bahwa masing-masing anggota Dewan Komisaris tidak mempunyai kepemilikan saham pada bank yang mencapai 5 % atau lebih, tidak mempunyai hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi dan atau Pemegang Saham Pengendali Bank.

b. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

- Dewan Komisaris memonitor dan memastikan penerapan Prinsip-prinsip tata kelola dalam semua aspek bisnis Bank dan pada semua tingkatan Hirarki Bank
- Dewan Komisaris memantau pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, memberikan rekomendasi dan mengarahkan, monitor dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank
- Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi membahas temuan audit dan rekomendasi yang diberikan baik oleh Auditor Internal, Auditor Eksternal maupun temuan oleh Bank Indonesia dan/atau otoritas lainnya.
- Dewan Komisaris tidak terlibat dalam proses perumusan keputusan operasional dengan pengecualian menyetujui kredit kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum atau peraturan lain yang berlaku.
- Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia, Dewan Komisaris harus membentuk Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite

Remunerasi dan Nominasi. Sampai dengan saat ini komite-komite tersebut telah dibentuk.

Secara keseluruhan hasil *self assessment* pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Dewan Komisaris berada pada peringkat 2 (Baik), dimana seluruh anggota Dewan Komisaris Bank berdomisili di Indonesia dan 2 (dua) dari 3(tiga) anggota Dewan Komisaris merupakan Dewan Komisaris Independen, tidak merangkap jabatan pada lembaga/perusahaan lain dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris yang lain. Namun dari beberapa kriteria/indikator penilaian *self assessment* tersebut masih terdapat pelaksanaan Tugas dan Tanggungjawab Dewan Komisaris yang belum maksimal dari segi struktur, proses dan hasil, diantaranya :

- Jumlah Dewan Komisaris berjumlah 3(tiga) orang yang berarti telah memenuhi standar minimum yang ditentukan namun belum maksimal dibandingkan dengan jumlah Direksi yang berjumlah 4(empat) orang.
- Dewan Komisaris telah melaksanakan tugasnya untuk memastikan terselenggaranya prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usaha bank namun kegiatan tersebut belum sepenuhnya dilakukan pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi, sehingga masih terdapat sebagian pegawai yang belum memahami GCG.
- Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, serta memberikan nasihat kepada Direksi namun pengawasan tersebut belum sepenuhnya dilakukan secara berkala dan tertuang dalam bentuk dokumen tertulis.
- Dewan Komisaris telah memberikan pengarahan, pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan strategis Bank, namun tidak ditemukan adanya dokumen yang memuat masukan/kajian dari Dewan Komisaris yang berkaitan dengan proses dimaksud.
- Dewan Komisaris belum sepenuhnya memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) Bank, auditor eksternal, hasil pengawasan Bank Indonesia dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya.

- Dewan Komisaris telah memastikan bahwa komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif sesuai dengan pedoman kerja Komite, namun masih ada komite yang belum melaksanakan tugasnya secara optimal.
- Dewan Komisaris belum menyediakan waktu yang cukup dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal dan tidak didukung dengan absensi kehadiran serta waktu kerja, sehingga tidak sesuai dengan yang diatur dalam tata tertib.
- Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak namun tidak tertuang dalam bentuk dokumen sebagai pendukung hasil rapat.
- Hasil rapat Dewan Komisaris belum mengungkapkan dissenting opinion secara jelas dalam notulen rapat.
- Hasil rapat Dewan Komisaris belum sepenuhnya terdistribusi kepada pihak yang terkait lainnya.
- Hasil rapat Dewan Komisaris belum sepenuhnya merupakan rekomendasi dan/atau arahan yang dapat diimplementasikan oleh RUPS dan/atau Direksi.

c. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

Selama tahun 2013 Dewan Komisaris PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara menyelenggarakan rapat sebanyak 3 (tiga) kali yang dihadiri oleh semua anggota Dewan Komisaris sebagai berikut :

Tabel 3
Rapat Dewan Komisaris

Rapat Dewan Komisaris		
Hari/ Tgl	Agenda Rapat	Peserta Rapat
Rabu, 11-09-2013	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Bank Indonesia Kendari Nomor 15/21/DPKP/Kdi Tanggal 6 September 2013 Perihal Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) Tahun 2012 2. Surat Bank Indonesia Kendari Nomor 15/22/DPKP/Kdi Tanggal 6 September 2013 Perihal Corporate Plan Tahun 2013-2018 3. Masalah internal Bank lainnya 	<ol style="list-style-type: none"> 1. H. Zainal Abidin (Ketua Dewan Pengawas) 2. H. Khaerul K.Raden (Direktur Utama) 3. H. La Utu (Direktur Kepatuhan) 4. Budiman Junus (Direktur Pemasaran) 5. Samaluddin (Sekretaris Dewan Pengawas)
Selasa, 17-09-2013	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi pelaksanaan RBB & RKAT s/d triwulan III tahun 2013 2. Hal-Hal lain yang dianggap penting 3. Surat pengaduan Saudara Muh. Natsir 	<ol style="list-style-type: none"> 1. H. Zainal Abidin (Ketua Dewan Pengawas) 2. H. Jahja Mallisa (Anggota Dewan Pengawas) 3. H. Suma Sanggo (Anggota Dewan pengawas) 4. Samaluddin (Sekretaris Dewan Pengawas)
Kamis, 7-11-2013	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberian penghargaan dan jasa pengabdian kepada Direksi BPD Sultra 	<ol style="list-style-type: none"> 1. H. Zainal Abidin (Ketua Dewan Pengawas) 2. H. Jahja Mallisa (Anggota Dewan Pengawas) 3. H. Suma Sanggo (Anggota Dewan pengawas) 4. Samaluddin (Sekretaris Dewan Pengawas)

2. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI

a. Jumlah, komposisi, kriteria dan independensi Direksi

Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 289 Tahun 2012 tanggal 20 Juli 2012 tentang Pengangkatan Jabatan Direksi Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara, maka ditetapkan Hj. Hayati Hasan sebagai Direktur Umum untuk jabatan 4 (empat) tahun terhitung sejak pelantikan, sehingga susunan Direksi BPD Sultra per 31 Desember 2012 adalah :

- Direktur Utama : Khaerul Kemala Raden
- Direktur Umum : Hj. Hayati Hasan
- Direktur Pemasaran : Budiman Junus
- Direktur Kepatuhan : La Utu

Selanjutnya dengan perubahan bentuk badan hukum Bank Pembangunan Daerah (BPD) Sulawesi Tenggara sesuai dengan Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 15/109/KEP GBI/2013 tanggal 18 November 2013 perihal pengalihan izin usaha dari PD. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara maka susunan Direksi PT. BPD Sultra per 31 Desember 2013 sesuai dengan Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 695 Tahun 2013 tanggal 27 November 2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara, menjadi :

- Direktur Utama : Khaerul Kemala Raden
- Direktur Umum : Hj. Hayati Hasan
- Direktur Pemasaran : Budiman Junus
- Direktur Kepatuhan : La Utu

Keanggotaan Direksi telah sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia dan telah memenuhi beberapa kriteria diantaranya seluruh anggota Direksi berdomisili di Indonesia, tidak rangkap jabatan, tidak memberikan surat kuasa kepada pihak lain yang dapat menyebabkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi.

Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia, seluruh Direksi tidak diperbolehkan memiliki hubungan keuangan dan/atau keluarga dengan anggota lain dari Direksi dan/atau dengan anggota Dewan Komisaris.

b. Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

- Direksi bertanggung jawab penuh untuk pengoperasian manajemen Bank dan mengelola bisnis sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya serta ketentuan dan peraturan yang berlaku.

- Direksi bertanggung jawab untuk memastikan penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance dalam semua aspek bisnis Bank dan di semua tingkat hirarki Bank.
- Direksi secara konsisten membahas temuan dan rekomendasi yang dilaporkan oleh unit audit internal, auditor eksternal, dan temuan Bank Indonesia dan/atau otoritas lain.
- Direksi membangun dan memastikan pelaksanaan Manajemen Risiko di semua tingkatan hirarki Bank dan memastikan fungsi Manajemen Risiko telah berjalan secara independen.
- Direksi melaporkan kinerjanya dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya kepada Rapat Umum Pemegang Saham.

Secara keseluruhan hasil *self assessment* pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Direksi berada pada peringkat 1 (Sangat Baik), dimana seluruh anggota Direksi Bank berdomisili di Indonesia, tidak merangkap jabatan pada lembaga/perusahaan lain dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Direksi dan Dewan Komisaris yang lain. Namun dari beberapa kriteria/indikator penilaian *self assessment* tersebut masih terdapat pelaksanaan Tugas dan Tanggungjawab Direksi yang belum maksimal, diantaranya :

- Direksi telah melaksanakan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usaha Bank namun pelaksanaannya belum maksimal pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi
- Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari SKAI, auditor eksternal, dan hasil pengawasan Bank Indonesia dan/atau hasil pengawasan otoritas lain namun belum semua hasil temuan dapat ditindaklanjuti secara tepat waktu dan memadai
- Pengambilan keputusan rapat Direksi telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat namun tidak ditemukan dokumen yang memuat hal dimaksud

- Hasil keputusan rapat yang diambil Direksi tidak semua dapat diimplementasikan dan sesuai dengan kebijakan, pedoman serta tata tertib kerja yang berlaku
- Sarana dan prasarana pengungkapan kebijakan strategis kepegawaian belum dilaksanakan secara maksimal
- Direksi belum maksimal dalam mengkomunikasikan kepada pegawai mengenai arah bisnis bank dalam rangka pencapaian misi dan visi bank.
- Tugas dan tanggungjawab Direksi dalam peningkatan budaya pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan keikutsertaan karyawan Bank dalam sertifikasi perbankan dan/atau pendidikan/pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu namun kegiatan peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan/pelatihan belum menyentuh ke semua pegawai.

c. Frekuensi Rapat Direksi

Frekuensi rapat Direksi maupun Direksi dengan Staff dan/atau Direksi dengan Auditor eksternal selama tahun 2013, dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 4
Rapat Direksi

No	Hari/Tgl	Agenda Rapat	Peserta Rapat
1	Kamis, 3 Januari 2013	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rekomendasi SKAI terkait pemblokiran bonus 2. Kinerja keuangan tahun buku 2012 3. Insentif pengembangan sistem 4. Pengadaan buku agenda 5. Pengadaan pakaian dinas 6. Batas wewenang maksimum pemberian kredit 	Direksi <ol style="list-style-type: none"> 1. Khaerul Kemala Raden (Direktur Utama) 2. La Utu (Direktur Kepatuhan) 3. Budiman Junus (Direktur Pemasaran) 4. Hj. Hayati Hasan (Direktur Umum)
2	Senin, 14 Januari 2013	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bantuan dana Masjid Agung Lasusua 2. Proposal Kejurda Roadrace Seri I dan Kapolda Cup 	Direksi <ol style="list-style-type: none"> 1. Khaerul Kemala Raden (Direktur Utama) 2. La Utu (Direktur Kepatuhan) 3. Budiman Junus (Direktur Pemasaran)
3	Selasa, 22 Januari 2013	<ol style="list-style-type: none"> 1. Grooming karyawan/wati BPD Sultra 2. Rehabilitas gedung kantor pusat, halaman, dan aula BPD Sultra 3. Usulan penambahan customer service BPD Sultra Cabang Kolaka 4. Usulan pegawai administrasi BPD Sultra Capem Punggaluku 5. Permohonan cuti diluar tanggungan Bank Sdr Suri Syahriah 6. Proposal Masjid Jabal Nur Kelurahan Anggilowu & Mesjid Al-Rahman Desa Wa woone 7. Penambahan pegawai di Divisi Kredit dan Pemasaran 8. Publikasi Otoritas Jasa Keuangan 9. Tes wawancara pegawai trainee BPD Sultra tahun 2012 10. Koreksi Denah Kantor BPD Sultra Cabang Unaaha dan Baubau 11. Penggantian Kepala Kantor Kas Pomalaa dan Lombe 	Direksi <ol style="list-style-type: none"> 1. Khaerul Kemala Raden (Direktur Utama) 2. La Utu (Direktur Kepatuhan) 3. Budiman Junus (Direktur Pemasaran) 4. Hj. Hayati Hasan (Direktur Umum)
4	Jumat, 1 Februari 2013	<ol style="list-style-type: none"> 1. Usulan Jadwal dan Anggaran kegiatan HUT BPD Sultra ke 45 	Direksi <ol style="list-style-type: none"> 1. Khaerul Kemala

		<ol style="list-style-type: none"> 2. Rapat evaluasi kinerja triwulan IV tahun 2012 BPD Sultra 3. Jawaban Dewan Pengawas BPD Sultra 4. Pameran Pembangunan Kolaka Fair 2013 5. Permohonan penggantian rangka dan atap rujan serta perbaikan instalasi Air PAM BPD Sultra Cabang Kolaka 6. Temuan SKAI pada BPD Sultra Cabang Unaaha Tahun 2010 7. Usul perpanjangan sewa rumah dinas BPD Sultra Capem Lasusua 8. Dukungan dana peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW tahun 1433 H / 2013 H 9. Surat PMI perihal pelaksanaan Donor Darah 10. Proposal panitia pelaksana Kapolda Cup tahun 2013 & proposal kejuaraan bola basket walikota Cup III dan Dancer Competition 2013 11. Asset BPD Sultra 	<p>Raden (Direktur Utama)</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. La Utu (Direktur Kepatuhan) 3. Budiman Junus (Direktur Pemasaran) 4. Hj. Hayati Hasan (Direktur Umum)
5	Senin, 4 Februari 2013	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perubahan Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara Tahun 2011 2. Surat Nomor 004/Dir. BPD/I/2013 tanggal 29 Januari 2013 Perihal Permintaan Tenaga Ahli 	<p>Direksi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Khaerul Kemala Raden (Direktur Utama) 2. La Utu (Direktur Kepatuhan) 3. Budiman Junus (Direktur Pemasaran) 4. Hj. Hayati Hasan (Direktur Umum)
6	Senin, 11 Februari 2013	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Asbanda perihal Undangan Rapat Persiapan & Permintaan Data Porseni X BPDSI 2013 2. Surat BPD Sultra Cabang Unaaha 3. Laporan hasil peninjauan kantor BPD Sultra pengelola Pasar DU Andoolo, Kantor BPD Sultra Kas Andoolo, Kantor BPD Sultra Kas Tinanggea 4. Proposal Media Kita Sejahtera 	<p>Direksi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Khaerul Kemala Raden (Direktur Utama) 2. La Utu (Direktur Kepatuhan) 3. Budiman Junus (Direktur Pemasaran) 4. Hj. Hayati Hasan (Direktur Umum)
7	Senin, 11 Februari 2013	Hasil pertemuan Direktur Umum dan Pemda Asera	<p>Direksi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Khaerul Kemala Raden

			(Direktur Utama) 2. La Utu (Direktur Kepatuhan) 3. Budiman Junus (Direktur Pemasaran) 4. Hj. Hayati Hasan (Direktur Umum)
8	Kamis, 21 Februari 2013	1. Persiapan RUPS Tahun Buku 2013 2. Perubahan bentuk badan hukum BPD Sultra 3. Hasil pemeriksaan khusus pada BPD Sultra Cabang Kolaka 4. Tindak lanjut temuan BPK RI 5. Partisipasi pada kegiatan pameran harian 6. Permintaan sumbangan dalam rangka observasi lapangan peserta Diklat PIM IV	Direksi 1. Khaerul Kemala Raden (Direktur Utama) 2. La Utu (Direktur Kepatuhan) 3. Budiman Junus (Direktur Pemasaran) 4. Hj. Hayati Hasan (Direktur Umum)
9	Kamis, 28 Februari 2013	Penggantian Pemimpin Bank Pembangunan Daerah Sultra Cabang Pembantu Sao-Sao	Direksi 1. Khaerul Kemala Raden (Direktur Utama) 2. La Utu (Direktur Kepatuhan) 3. Budiman Junus (Direktur Pemasaran) 4. Hj. Hayati Hasan (Direktur Umum)
10	Kamis, 14 Maret 2013	Permohonan bantuan dana SMP Negeri 1 Kendari	Direksi 1. Khaerul Kemala Raden (Direktur Utama) 2. La Utu (Direktur Kepatuhan) 3. Budiman Junus (Direktur Pemasaran) 4. Hj. Hayati Hasan (Direktur Umum)
11	Senin, 18 Maret 2013	Pemberian pangkat Anumerta	Direksi 1. Khaerul Kemala Raden (Direktur Utama) 2. La Utu (Direktur Kepatuhan) 3. Budiman Junus (Direktur Pemasaran) 4. Hj. Hayati Hasan (Direktur Umum)

12	Kamis, 28 Maret 2013	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tindak lanjut hasil RUPS BPD Sultra Tahun Buku 2012 2. Rehab gedung PD Percetakan Sultra untuk dijadikan Kantor Pusat Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara 3. Kegiatan Porseni BPD SI, Porsebank BMPD Sultra Tahun 2013 dan Studi Banding BMPD Sultra Tahun 2013 4. Usulan kontrak di Lods Pasar Lasusua untuk kebutuhan kantor kas 5. Rencana gedung BPD Sultra Kantor Kas Rate-Rate 6. Hasil rapat DPP BPD Sultra 7. Perjanjian kerjasama BPD Sultra dengan PLN 8. Service Level Agreement kredit BPD Sultra 9. Proposal bantuan dana 10. Surat Lembaga Pendidikan Yayasan Argadia 	<p>Direksi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Khaerul Kemala Raden (Direktur Utama) 2. La Utu (Direktur Kepatuhan) 3. Budiman Junus (Direktur Pemasaran) 4. Hj. Hayati Hasan (Direktur Umum)
13	Senin, 8 April 2013	Pengadaan Kayak (Kano)	<p>Direksi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Khaerul Kemala Raden (Direktur Utama) 2. La Utu (Direktur Kepatuhan) 3. Budiman Junus (Direktur Pemasaran) 4. Hj. Hayati Hasan (Direktur Umum)
14	Kamis, 11 April 2013	<ol style="list-style-type: none"> 1. Risalah Rapat BMPD Sulawesi Tenggara 2. Surat ASBANDA 3. Surat BPD Sultra Cabang Utama 4. Evaluasi Kinerja Triwulan I Tahun 2013 5. Time schedule kelayakan pembukaan jaringan kantor 6. Permohonan bantuan dana 	<p>Direksi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Khaerul Kemala Raden (Direktur Utama) 2. La Utu (Direktur Kepatuhan) 3. Budiman Junus (Direktur Pemasaran) 4. Hj. Hayati Hasan (Direktur Umum)
15	Kamis, 18 April 2013	<ol style="list-style-type: none"> 1. Seminar dan studi banding Dana Pensiun 2. Evaluasi terhadap kebijakan remunerasi 	<p>Direksi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Khaerul Kemala Raden (Direktur Utama) 2. La Utu (Direktur Kepatuhan) 3. Budiman Junus (Direktur Pemasaran) 4. Hj. Hayati Hasan (Direktur Umum)

16	Kamis, 2 Mei 2013	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi pelaksanaan KPE Tahun 2012 di Makassar 2. Penyelesaian registrasi dan distribusi KPE Tahun 2012 3. Tahap pengambilan gambar dan data KPE oleh Sucofindo/BKN 4. Registrasi kartu KPE setelah diterima dari Sucofindo 5. Distribusi kartu KPE 	<p>Direksi, Divisi Treasury, Divisi SDM, Divisi Keuangan & Cabut</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Khaerul Kemala Raden (Direktur Utama) 2. Budiman Junus (Direktur Pemasaran) 3. Nunung Yunari (Kadiv Treasury) 4. Hadiman (Kadiv SDM & Umum) 5. La Ode Mustika (KA.Cabut) 6. Syahrul Firdaus (Divisi Keuangan) 7. Siska (AO Funding Cabut)
17	Selasa, 7 Mei 2013	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memo Divisi SDM & Umum perihal : <ol style="list-style-type: none"> a. Usulan pengangkatan pegawai tetap b. Usulan penyesuaian masa kerja pegawai c. Pembayaran bonus d. Usulan peserta Sespincab LPPI Angkatan 73 2. Proposal bantuan dana 	<p>Direksi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Khaerul Kemala Raden (Direktur Utama) 2. La Utu (Direktur Kepatuhan) 3. Budiman Junus (Direktur Pemasaran) 4. Hj. Hayati Hasan (Direktur Umum)
18	Kamis, 23 Mei 2013	<ol style="list-style-type: none"> 1. Proposal Laskar Anti Korupsi Sultra 2. Proposal kegiatan The CAS Puday Cup I 	<p>Direksi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Khaerul Kemala Raden (Direktur Utama) 2. La Utu (Direktur Kepatuhan) 3. Hj. Hayati Hasan (Direktur Umum)
19	Senin, 20 Mei 2013	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat BPD Sultra Capem Lasusua mengenai usulan pembuatan gasebo 2. Kartu Pegawai Elektronik (KPE) 3. PD. BPR Bahteramas Kota Kendari 4. Rencana lokasi kantor BPD Sultra Capem Bombana 5. Hasil seleksi tes wawancara akhir 	<p>Direksi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Khaerul Kemala Raden (Direktur Utama) 2. La Utu (Direktur Kepatuhan) 3. Budiman Junus (Direktur Pemasaran) 4. Hj. Hayati Hasan (Direktur Umum)
20	Jumat, 7 Juni 2013	Penempatan dan Pemutasian Pegawai	<p>Direksi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Khaerul Kemala Raden (Direktur Utama) 2. La Utu (Direktur Kepatuhan) 3. Budiman Junus

			(Direktur Pemasaran) 4. Hj. Hayati Hasan (Direktur Umum)
21	Jumat, 7 Juni 2013	1. Proposal Asosiasi Ilmuwan Manajemen Indonesia (AIMI) 2. Permohonan bantuan dana Dharma Wanita Persatuan 3. Palang Merah Indonesia (PMI) a. PMI Prov. Sultra b. PMI Kab. Konawe c. PMI Kota Kendari	Direksi 1. Khaerul Kemala Raden (Direktur Utama) 2. La Utu (Direktur Kepatuhan) 3. Budiman Junus (Direktur Pemasaran) 4. Hj. Hayati Hasan (Direktur Umum)
22	Senin, 24 Juni 2013	1. Laporan studi banding Dewan Pengawas Dana Pensiun BPD Sultra 2. Memo Divisi Keuangan BPD Sultra 3. Penawaran info Bank 4. Penawaran Training Mata Rantai Resources 5. Proposal-proposal permintaan bantuan dana	Direksi 1. Khaerul Kemala Raden (Direktur Utama) 2. La Utu (Direktur Kepatuhan) 3. Budiman Junus (Direktur Pemasaran) 4. Hj. Hayati Hasan (Direktur Umum)
23	Kamis, 27 Juni 2013	1. Hasil rapat DPP BPD Sultra 2. Pembelian tanah untuk lokasi kantor Capem Bombana 3. Surat BPD Sultra Capem Saosao 4. Usulan pembangunan/rehabilitas kantor 5. Hasil tes wawancara 6. Proposal Masjid Akbar Fastabiqul Khaerat 7. Proposal Pesantren Metropolitan Umushabri Kendari	Direksi 1. Khaerul Kemala Raden (Direktur Utama) 2. La Utu (Direktur Kepatuhan) 3. Budiman Junus (Direktur Pemasaran) 4. Hj. Hayati Hasan (Direktur Umum)
24	Selasa, 2 Juli 2013	1. Proposal bantuan dana Masjid Baburahman Kelurahan Doule 2. Proposal remaja Masjid Baburrahman Kelurahan Talia 3. Proposal Masjid Al-Azhar 4. Penawaran sponsorship Harian Rakyat Sultra 5. Surat Serikat Karyawan BPD Sultra 6. Penawaran kerjasama Kendari TV	Direksi 1. Khaerul Kemala Raden (Direktur Utama) 2. La Utu (Direktur Kepatuhan) 3. Hj. Hayati Hasan (Direktur Umum)
25	Rabu, 3 Juli 2013	1. Penerbitan buku kerja Badan Kepegawaian Negara Tahun 2014 2. Usulan pengangkatan	Direksi 1. Khaerul Kemala Raden (Direktur Utama) 2. La Utu (Direktur

		<p>pegawai PKWTT</p> <ol style="list-style-type: none"> Risalah rapat Komite Pengarah IT BPD Sultra 	<p>Kepatuhan)</p> <ol style="list-style-type: none"> Budiman Junus (Direktur Pemasaran) Hj. Hayati Hasan (Direktur Umum)
26	Rabu, 10 Juli 2013	<ol style="list-style-type: none"> Penawaran kerjasama Kendari TV Surat Dinas Pekerjaan Umum Prov. Sultra Perubahan jam kerja Kantor BPD Sultra Kas Baruga Surat penawaran TVRI perihal kuis dan kegiatan ramadhan Surat BPD Sultra Capem Lasusua Memo Divisi Keuangan dan Akuntansi Memo Divisi SDM & Umum perihal pengadaan motor dinas 	<p>Direksi</p> <ol style="list-style-type: none"> Khaerul Kemala Raden (Direktur Utama) La Utu (Direktur Kepatuhan) Budiman Junus (Direktur Pemasaran) Hj. Hayati Hasan (Direktur Umum)
27	Selasa, 23 Juli 2013	<ol style="list-style-type: none"> Bantuan Dana STQ Bantuan dana untuk korban bencana banjir 	<p>Direksi</p> <ol style="list-style-type: none"> Khaerul Kemala Raden (Direktur Utama) La Utu (Direktur Kepatuhan) Budiman Junus (Direktur Pemasaran) Hj. Hayati Hasan (Direktur Umum)
28	Rabu, 24 Juli 2013	<ol style="list-style-type: none"> Dukungan partisipasi STQ Nasional Surat BPD Sultra Capem Ladongi Memo Divisi SDM & Umum 	<p>Direksi</p> <ol style="list-style-type: none"> Khaerul Kemala Raden (Direktur Utama) La Utu (Direktur Kepatuhan) Budiman Junus (Direktur Pemasaran) Hj. Hayati Hasan (Direktur Umum)
29	Senin, 29 Juli 2013	<ol style="list-style-type: none"> Souvenir Jemaah Haji Kesiapan RTGS BPD Sultra Pertemuan BPD Sultra dengan Pihak PLN Tunjangan Hari Raya Dana Pensiun BPD Sultra SMS Banking BPD Sultra Bank BPR Bahteramas 	<p>Direksi</p> <ol style="list-style-type: none"> Khaerul Kemala Raden (Direktur Utama) La Utu (Direktur Kepatuhan) Budiman Junus (Direktur Pemasaran) Hj. Hayati Hasan (Direktur Umum)
30	Selasa, 30 Juli 2013	<ol style="list-style-type: none"> Memo Divisi SDM & Umum perihal Hasil investigasi Memo usulan Divisi SDM & Umum BPD Sultra 	<p>Direksi</p> <ol style="list-style-type: none"> Khaerul Kemala Raden (Direktur Utama) La Utu (Direktur

		3. Memo Divisi TSI BPD Sultra 4. Proposal Masjid Nurul Amin Poltekes	Kepatuhan) 3. Budiman Junus (Direktur Pemasaran) 4. Hj. Hayati Hasan (Direktur Umum)
31	Senin, 12 Agustus 2013	1. Persiapan pelaksanaan perubahan bentuk Badan Hukum 2. Penyaluran CSR	Direksi 1. Khaerul Kemala Raden (Direktur Utama) 2. La Utu (Direktur Kepatuhan) 3. Budiman Junus (Direktur Pemasaran) 4. Hj. Hayati Hasan (Direktur Umum)
32	Kamis, 29 Agustus 2013	Penempatan dan pemutasian pegawai	Direksi & Divisi SDM & Umum 1. Khaerul Kemala Raden (Dirut BPD Sultra) 2. La Utu (Direktur Kepatuhan BPD Sultra) 3. Hadiman (Kepala Divisi SDM & Umum) 4. H. Herman H. Ali (Kabag SDM)
33	Rabu, 4 September 2013	1. Program Peningkatan Peranan Wanita Bidang Kesejahteraan Sosial (P2WKS) 2. Permohonan Sponsorsip Persatuan Wartawan Indonesia (PWI)	Direksi 1. Khaerul Kemala Raden (Direktur Utama) 2. La Utu (Direktur Kepatuhan) 3. Budiman Junus (Direktur Pemasaran)
34	Rabu, 11 September 2013	1. Surat Bank Indonesia No. 15/21/DPKP/Kdi tanggal 5 September 2013 perihal pelaksanaan GCG Tahun 2013 2. Usul kerjasama Media Kalosara Indonesia 3. Penawaran Renewal Antivirus G Data	Direksi 1. Khaerul Kemala Raden (Direktur Utama) 2. La Utu (Direktur Kepatuhan) 3. Budiman Junus (Direktur Pemasaran) 4. Hj. Hayati Hasan (Direktur Umum)
35	Selasa, 17 September 2013	Rencana ikut lelang jaminan	Direksi 1. Khaerul Kemala Raden (Direktur Utama) 2. Budiman Junus (Direktur Pemasaran) 3. Hj. Hayati Hasan (Direktur Umum)
36	Rabu, 18 September 2013	1. Pembahasan laporan mesin absensi Sdr. La Ode Basaru (Koor. Kantor kas Tomia)	Direksi dan Divisi SDM & Umum 1. Hj. Hayati Hasan

		<ol style="list-style-type: none"> 2. Pembahasan Laporan absensi bulanan 3. Kriteria penghargaan untuk masa kerja pegawai 15 tahun, 25 tahun dan 30 tahun 4. Agenda kerja bagian umum tahun 2013 	<p>(Direktur Umum)</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Hadiman (Kadiv SDM & Umum) 3. H. Herman (Kabag SDM) 4. Mickel Mappatunru (Plt. Kabag Umum) 5. Muh. Ali Rizki (Staf umum) 6. Samsurijal (Staf SDM)
37	Kamis, 26 September 2013	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Bank Indonesia Kendari 2. Hasil kajian Pedoman Pembukaan Rekening Tabunganku kolektif 3. Kasus Hukum Nasabah Kredit Macet BPD Sultra Cabang Kolaka 4. Usulan kemitraan CSR Dinas Pendidikan Kota Kendari 5. Rencana Rehabilitas kantor BPD Sultra Cab. Unaaha dan Cab. Baubau 6. Pengunduran diri Sdr. Ganuar Wiyudi 7. Permohonan izin Sdr. Burhanuddin Tongasa 8. Usul pengecatan dinding plat BPD Sultra Capem Saosao 9. Surat DPD Perbarindo 10. Proposal BEM FK Unhalu 11. Rencana Kantor Siompu 12. Rencana Audit Aset BPD Sultra 13. Kantor BPD Sultra Kas Mowewe 14. Kredit Pegawai 	<p>Direksi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Khaerul Kemala Raden (Direktur Utama) 2. La Utu (Direktur Kepatuhan) 3. Budiman Junus (Direktur Pemasaran)
38	Rabu, 9 Oktober 2013	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyampaian Kebijakan Umum Direksi BPD Sultra Tahun 2014 2. Memo Divisi Perencanaan Nomor 082/135.000/10/13/PRC 3. Penawaran PT. Batasa Tazkia Consulting 4. Surat BPD Sultra Cabang Kolaka 5. Koperasi Keluarga Besar BPD Sultra 6. Penawaran CV. Blue Truss 7. Permohonan Penyesuaian Masa Kerja Sdr. Almasyah 	<p>Direksi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Khaerul Kemala Raden (Direktur Utama) 2. La Utu (Direktur Kepatuhan) 3. Budiman Junus (Direktur Pemasaran)

		Patoro	
39	Senin, 28 Oktober 2013	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hasil temuan Bank Indonesia 2. Dukungan dana SIPP (Sosialisasi Aplikasi Sistem Pelaporan Perusahaan) PT. Jamsostek 3. Dukungan dana LEMKARI 4. Struktur Organisasi 5. Usul Lelang/ penjualan kendaraan dinas BPD Sultra 	<p>Direksi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Khaerul Kemala Raden (Direktur Utama) 2. La Utu (Direktur Kepatuhan) 3. Budiman Junus (Direktur Pemasaran)
40	Senin, 28 Oktober 2013	Rekomendasi KAP	<p>Direksi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Khaerul Kemala Raden (Direktur Utama) 2. La Utu (Direktur Kepatuhan) 3. Budiman Junus (Direktur Pemasaran) 4. Hj. Hayati Hasan (Direktur Umum)
41	Selasa, 29 Oktober 2013	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembahasan temuan-temuan strategis pemeriksaan 2. Tanggapan dan komitmen bank 	<p>Bank Indonesia Prov. Sultra dan BPD Sultra</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dian Nugraha (Deputi Direktur BI) 2. Farley Piga (Asisten Direktur BI) 3. Syamsul Bahri (Manajer Pengawas Bank BI) 4. Taufan Anggara (Asisten Manajer Pengawas BI) 5. Rachmawan Rizkyandri (Asisten Manajer) 6. La Ode Diman (Staf Pengawas Bank Yuniior) 7. Jahja Mallisa (Dewan Pengawas BPD Sultra) 8. H. Suma Sanggo (Dewan Pengawas BPD Sultra) 9. Khaerul Kemala Raden (Dirut BPD Sultra) 10. Budiman Junus (Direktur Pemasaran BPD Sultra) 11. La Utu (Direktur Kepatuhan BPD Sultra)
42	Senin, 4 November 2013	1. Pemberian uang penghargaan masa kerja pegawai BPD	<p>Direksi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Khaerul Kemala Raden

		<p>Sultra</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Memo SKAI No. 189/135.000/10/13 SKAI tanggal 29 Oktober 2013 3. Kasus kecelakaan yang melibatkan pegawai atas nama Ramli 4. Penyelesaian uang muka kesehatan atas nama Adi Mora Jamil 5. Proposal lomba gerakan sayang Ibu dari kelurahan Korumba 6. Proposal dari Kelurahan Watu-watu 	<p>(Direktur Utama)</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. La Utu (Direktur Kepatuhan) 3. Budiman Junus (Direktur Pemasaran)
43	Rabu, 6 November 2013	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembahasan mengenai tindak lanjut dan rencana perbaikan kelemahan-kelemahan dalam penerapan GCG 2. Tanggapan dan komitmen Bank 	<p>Bank Indonesia Perwakilan Sultra dan BPD Sultra</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dian Nugraha (Deputi Direktur BI) 2. Syamsul Bahri (Manajer Pengawas Bank BI) 3. Taufan Anggara (Asisten Manajer Pengawas BI) 4. Rachmawan Rizkyandri (Asisten Manajer) 5. La Ode Diman (Staf Pengawas Bank Yunion) 6. La Utu (Direktur Kepatuhan BPD Sultra) 7. Arfianus (Kadiv MRK) 8. Fajar Elvianto (Kabag SKMR) 9. Haeriah (Kabag Kepatuhan) 10. Andi Amrah Ahmad (Staf MRK) 11. Saldiansyah Sabara (Staf MRK)
44	Jumat, 8 November 2013	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat BPDST Capem Lasusua No. 151/135.002.01/11/13/Lsa tanggal 7 November 2013 2. Proposal penawaran cetakan kalender dari Koperasi Keluarga Besar BPD Sultra 3. Surat Koperasi BPD Sultra No. 	<p>Direksi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Khaerul Kemala Raden (Direktur Utama) 2. La Utu (Direktur Kepatuhan) 3. Budiman Junus (Direktur Pemasaran)

		10/KKB.BPDST/XI/2013 tanggal 7 November 2013 4. Proposal pembangunan Masjid Al Jaariyah 5. Proposal dalam rangka HUT Satpam ke 33 Tahun 2013	
45	Jumat, 15 November 2013	1. Analisa bisnis pengembangan layanan EDC 2. Bantuan jasa pengacara atas kasus hukum H. Syamsul Alam 3. Usul penutupan Rekening Giro 4. Masa Jabatan Pengurus Dana Pensiun 5. Perkembangan kasus kecelakaan Sdr. Ramli 6. Memo Divisi SDM & Umum perihal usulan penyesuaian masa kerja pegawai 7. Hasil pertemuan Bank Indonesia dan BPD Sultra dalam rangka rencana kesiapan pelaksanaan Corporate Plan serta tindak lanjut dan rencana pembenahan GCG	Direksi 1. Khaerul Kemala Raden (Direktur Utama) 2. La Utu (Direktur Kepatuhan) 3. Budiman Junus (Direktur Pemasaran) 4. Hj. Hayati Hasan (Direktur Umum)
46	Senin, 26 November 2013	1. Perkembangan kasus hukum Saudara H. Syamsul Alam 2. Surat Asbanda Nomor 180/PH/XI/2013 3. Usulan Direktur Utama mengenai gambar kalender PT. BPD Sultra Tahun 2014 4. Proposal dari Pesantren Ummushabri Kendari dan proposal dari Kendari Pos	Direksi 1. Khaerul Kemala Raden (Direktur Utama) 2. La Utu (Direktur Kepatuhan) 3. Budiman Junus (Direktur Pemasaran) 4. Hj. Hayati Hasan (Direktur Umum)
47	Kamis, 28 November 2013	Proposal kejuaraan Sepakbola Bupati Cup VI	Direksi 1. Khaerul Kemala Raden (Direktur Utama) 2. Budiman Junus (Direktur Pemasaran) 3. Hj. Hayati Hasan (Direktur Umum)
48	Jumat, 6 Desember 2013	Rancangan SK Penghargaan	Direksi 1. Khaerul Kemala Raden (Direktur Utama) 2. La Utu (Direktur Kepatuhan) 3. Budiman Junus (Direktur Pemasaran)

			4. Hj. Hayati Hasan (Direktur Umum)
49	Kamis, 12 Desember 2013	Memo Divisi SDM dan Umum Nomor 470/135.000/12/13/SDU tanggal 10 Desember 2013	Direksi 1. Khaerul Kemala Raden (Direktur Utama) 2. La Utu (Direktur Kepatuhan) 3. Budiman Junus (Direktur Pemasaran) 4. Hj. Hayati Hasan (Direktur Umum)
50	Kamis, 12 Desember 2013	1. Penawaran kerjasama dari PT. Bank Mandiri Syariah Kantor Cabang Kendari 2. Gentlement Agreement Pelaksanaan Kas Titipan Baubau Sultra 3. Surat dari Serikat Karyawan PT. Bank Sultra 4. Usul perubahan peraturan Dana Pensiun PT. Bank Sultra 5. Pembayaran Bonus Tahun 2013 6. Undangan iklan kemitraan Selamat & Sukses 53 Tahun PT. Bank Sulselbar 7. Proposal Masjid Al-Khairat Desa Labeau 8. Permohonan bantuan dari Pemda Bombana 9. Dukungan kegiatan tahun baru yang diajukan oleh Pemda Kabupaten Konawe 10. Permohonan Door prize 11. Penempatan dana dalam bentuk deposito pada BPR Bahteramas Konsel	Direksi 1. Khaerul Kemala Raden (Direktur Utama) 2. La Utu (Direktur Kepatuhan) 3. Budiman Junus (Direktur Pemasaran) 4. Hj. Hayati Hasan (Direktur Umum)
51	Rabu, 18 Desember 2013	1. Memo Divisi Perencanaan PT. Bank Sultra perihal Laporan Analisis Bisnis 2. Surat Pemerintah Daerah Sulawesi Tenggara perihal partisipasi dan dukungan penerbitan Buku Potret Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2014 3. Surat Saudara Yetty Octavia Chandra perihal penawaran harga rumah/ruko eks Almarhum Aleang	Direksi 1. Khaerul Kemala Raden (Direktur Utama) 2. La Utu (Direktur Kepatuhan) 3. Budiman Junus (Direktur Pemasaran) 4. Hj. Hayati Hasan (Direktur Umum)

52	Jumat, 20 Desember 2013	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memo Divisi Keuangan dan Akuntansi PT. BPD Sultra perihal persetujuan pengakuan pendapatan dan biaya selisih saldo ring kredit 2. Memo Divisi SDM & Umum perihal hasil rapat Dewan Pertimbangan Pegawai 3. Memo Divisi SDM & Umum perihal hasil pengadaan kalender PT. BPD Sultra 2014 4. Permohonan proposal Ikatan Alumni SMEA Kendari 	Direksi <ol style="list-style-type: none"> 1. Khaerul Kemala Raden (Direktur Utama) 2. La Utu (Direktur Kepatuhan) 3. Budiman Junus (Direktur Pemasaran) 4. Hj. Hayati Hasan (Direktur Umum)
----	-------------------------------	--	---

3. KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS-TUGAS KOMITE

a. Struktur, Keanggotaan dan Independensi Komite

Sebagai bentuk implementasi dan kepatuhan pada ketentuan, Dewan Komisaris telah membentuk 3 (tiga) komite yang membantu efektivitas pelaksanaan tugas Dewan Komisaris yaitu :

KOMITE AUDIT

Diketahui oleh seorang Komisaris Independen dengan 2 (dua) orang anggota komite dari Pihak Independen. Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara Nomor 151/Kpts/Dir.BPD/2012 tanggal 15 Juni 2012 tentang Pembentukan Komite Audit Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara, maka susunan Komite Audit PT. BPD Sulawesi Tenggara posisi 31 Desember 2013 adalah :

Tabel 5
Susunan Komite Audit

No.	NAMA	JABATAN	KET.
1.	Drs. H.Suma Sanggo	Ketua merangkap Anggota	Dewan Pengawas Independen
2.	Dr. M. Natsir, SE, M.Si	Anggota	Pihak Independen
3.	Dr. Sujono, SE, M.Si	Anggota	Pihak Independen

KOMITE PEMANTAU RISIKO

Diketahui oleh seorang Komisaris Independen dengan 2 (dua) orang anggota komite dari Pihak Independen. Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara Nomor 152/Kpts/Dir.BPD/2012 tanggal 15 Juni 2012 tentang Pembentukan Komite Pemantau Risiko Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara, maka susunan Komite Pemantau Risiko PT. BPD Sulawesi Tenggara posisi 31 Desember 2013 adalah :

Tabel 6
Susunan Komite Pemantau Risiko

No.	NAMA	JABATAN	KET.
1.	Drs. H. Jahja Mallisa	Ketua merangkap Anggota	Dewan Pengawas Independen
2.	Karman, SE	Anggota	Pihak Independen
3.	Drs. La Atjeh Amin	Anggota	Pihak Independen

KOMITE REMUNERASI & NOMINASI

Diketahui oleh seorang Komisaris Independen dengan 2 (dua) orang anggota komite dari 1 (satu) orang Pihak non Independen dan 1 (satu) orang Pejabat Eksekutif Bank. Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara Nomor 150/Kpts/Dir.BPD/2012 tanggal 15 Juni 2012 tentang Pembentukan Komite Remunerasi dan Nominasi PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara, maka susunan Komite Remunerasi dan Nominasi PT. BPD Sulawesi Tenggara periode 31 Desember 2013 adalah :

Tabel 7
Susunan Komite Remunerasi dan Nominasi

No.	NAMA	JABATAN	KET.
1.	Drs. H. Jahja Mallisa	Ketua merangkap Anggota	Dewan Pengawas Independen
2.	Ir. H. Zainal Abidin, MM	Anggota	Dewan Pengawas Non Independen
3.	Kepala Divisi SDM & Umum BPD Sultra	Anggota	

b. Tugas dan Tanggung Jawab Komite

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit :

- Bertanggung jawab untuk menilai rencana kerja SKAI, monitoring dan mengevaluasi perencanaan audit, pelaksanaan audit dan tindak lanjut temuan audit;
- Memberikan saran secara independen kepada Dewan Komisaris atas Pelaksanaan Good Corporate Governance sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;
- Membuat rekomendasi mengenai penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham;
- Menyusun dan mengusulkan Pedoman Kerja Komite Audit (*Audit Committee Charter*) kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan;
- Menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Dewan Komisaris.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pemantau Risiko

- Menilai dan mengevaluasi efektivitas dan kepatuhan pelaksanaan strategi dan kebijakan manajemen risiko;

- Memantau dan menilai pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Unit kerja Manajemen Risiko dalam membuat rekomendasi kepada Dewan Komisaris;
- Memantau perkembangan kasus litigasi yang melibatkan Bank dan menilai dampak risiko yang ditimbulkan seperti risiko regulasi, risiko reputasi dan risiko kepatuhan;
- Mengevaluasi laporan profil risiko;
- Mendorong terciptanya budaya kerja yang berorientasi risiko.

Tugas dan tanggung jawab Komite Remunerasi dan Nominasi :

a. Terkait dengan kebijakan Remunerasi :

- Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi;
- Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris menyangkut:
 1. Kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada RUPS;
 2. Kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi

b. Terkait dengan kebijakan Nominasi :

- Membuat Pedoman Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi;
- Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi;
- Menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS;
- Memberikan rekomendasi mengenai calon anggota Dewan Komisaris dan/ atau Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS;
- Memberikan rekomendasi Pihak Independen yang akan menjadi anggota Komite sebagaimana yang dipersyaratkan kepada Dewan Komisaris;
- Wajib memastikan bahwa kebijakan remunerasi paling kurang sesuai dengan:
 - a) Kinerja keuangan dan pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b) Prestasi kerja individual;

- c) Kewajaran dengan bank lain yang setara (*peer group*) dan pertimbangan sasaran dan strategi jangka panjang PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara.

c. Frekuensi Rapat Komite

Pelaksanaan rapat komite belum maksimal dan belum sepenuhnya terdokumentasi dengan baik. Berikut Rapat Komite yang dilakukan tahun 2013.

c.1. RAPAT KOMITE AUDIT

Tabel 8

Rapat Komite Audit

NO	Hari/Tgl	Agenda Rapat	Peserta Rapat
1	Rabu, 20-02-2013	Review terhadap Surat Nomor 033/135.000/02/13/SKAI perihal hasil pemeriksaan khusus SKAI pada BPD Sultra Cabang Kolaka	Komite Audit 1. H. Suma Sanggo (Ketua Komite Audit) 2. M. Natsir (Anggota Komite Audit) 3. Sujono (Anggota Komite Audit)
2	Kamis, 14-03-2013	Pemeriksaan umum Bank Indonesia posisi pemeriksaan 30 Juni 2012	Komite Audit 1. H. Suma Sanggo (Ketua Komite Audit) 2. M. Natsir (Anggota Komite Audit) 3. Sujono (Anggota Komite Audit)
3	Kamis, 28-03-2013	Hasil Pemeriksaan SKAI Tahun 2012	Komite Audit 1. H. Suma Sanggo (Ketua Komite Audit) 2. M. Natsir (Anggota Komite Audit) 3. Sujono (Anggota Komite Audit)
4	Rabu, 04-04-2013	Review Laporan Hasil Pemeriksaan KAP Maksum Suyamto, Hirjan dan Rekan Tahun buku 2012	Komite Audit 1. H. Suma Sanggo (Ketua Komite Audit) 2. M. Natsir (Anggota Komite Audit) 3. Sujono (Anggota Komite Audit)
5	Jumat, 03-05-2013	Laporan realisasi rencana bisnis triwulan I tahun 2013, Nomor 048/135.000/04/PRC	Komite Audit 1. H. Suma Sanggo (Ketua Komite Audit) 2. M. Natsir (Anggota Komite Audit) 3. Sujono (Anggota Komite Audit)
6	Senin,	Tindak lanjut Laporan Hasil	Komite Audit dengan SKAI

	06-05-2013	Pemeriksaan (LHP) SKAI	<ol style="list-style-type: none"> 1. H. Suma Sanggo (Ketua Komite Audit) 2. M. Natsir (Anggota Komite Audit) 3. Sujono (Anggota Komite Audit) 4. Harianto (Kepala SKAI) 5. Samaluddin (Sekretaris Dewan Pengawas)
7	Selasa, 17-09-2013	Review terhadap surat Bank Indonesia Perwakilan Nomor 15/21/DPKP/Kdi tanggal 06 September 2013 perihal pelaksanaan GCG Tahun 2012 di BPD Sultra	<p>Komite Audit</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. H. Suma Sanggo (Ketua Komite Audit) 2. M. Natsir (Anggota Komite Audit) 3. Sujono (Anggota Komite Audit)
8	Selasa, 01-10-2013	Review terhadap surat Nomor 167/135.000/09/13/SKAI perihal realisasi program kerja audit tahunan SKAI	<p>Komite Audit</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. H. Suma Sanggo (Ketua Komite Audit) 2. M. Natsir (Anggota Komite Audit) 3. Sujono (Anggota Komite Audit)
9	Senin, 21-10-2013	Pembahasan rekomendasi penunjukan Kantor Akuntan Publik yang melaksanakan pekerjaan Audit Laporan Keuangan BPD Sultra tahun buku 2013	<p>Komite Audit</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. H. Suma Sanggo (Ketua Komite Audit) 2. M. Natsir (Anggota Komite Audit) 3. Sujono (Anggota Komite Audit)
10	Senin, 16-12-2013	Review penyelesaian hasil temuan SKAI pada BPD Sultra Cabang Unaaha untuk semester I Tahun 2009	<p>Komite Audit</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. H. Suma Sanggo (Ketua Komite Audit) 2. M. Natsir (Anggota Komite Audit) 3. Sujono (Anggota Komite Audit)

c.2. RAPAT KOMITE PEMANTAU RISIKO

Tabel 9

Rapat Komite Pemantau Risiko

No	Hari/Tgl	Agenda Rapat	Peserta Rapat
1	Kamis 21-03-2013	Membahas tugas dan tanggung jawab komisaris sebagai Ketua Komite Pemantau Risiko	<ol style="list-style-type: none"> 1. H. Jahja Malisa (Ketua Komite Pemantau Risiko) 2. Karman (Anggota Komite Pemantau Risiko) 3. La Atjeh Amin (Anggota Komite Pemantau Risiko) 4. Samaluddin (Sekretaris Dewan Pengawas)
2	Senin, 15-04-2013	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tugas pokok komite pemantau risiko 2. Risiko-risiko yang terdapat 	<p>Komite Pemantau Risiko dengan Divisi MRK</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. H. Jahja Malisa (Ketua Komite

		pada BPD Sultra yang masuk dalam kategori high risk	Pemantau Risiko) 2. La Atjeh Amin (Anggota Komite Pemantau Risiko) 3. Karman (Anggota Komite Pemantau Risiko) 4. Samaluddin (Sekretaris Dewan Pengawas) 5. Arfianus (Kadiv MRK & Kepatuhan) 6. Fajar Elvianto (Kabag SKMR) 7. Mu. Natsir (Kabag Hukum) 8. Haeriah (Kabag Kepatuhan)
3	Kamis, 13-06-2013	Membahas Perjanjian Kerjasama antara PT. Jiwasraya dengan BPD Sultra tentang pengelolaan asuransi jiwa kredit kumpulan berupa fee dan premi asuransi yang dibebankan kepada nasabah	Komite Pemantau Risiko dengan Divisi Kredit 1. H. Jahja Malisa (Ketua Komite Pemantau Risiko) 2. La Atjeh Amin (Anggota Komite Pemantau Risiko) 3. Karman (Anggota Komite Pemantau Risiko) 4. Samaluddin (Sekretaris Dewan Pengawas) 5. Tatiek Maliati (Kepala Divisi Kredit) 6. Ardin (Kabag Adm Kredit)

c.3. KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI

Komite Remunerasi dan Nominasi selama tahun 2013 melakukan rapat komite namun tidak didokumentasikan. Hal ini senantiasa menjadi perhatian yang akan datang

d. Realisasi dan Program Kerja Komite

1. Komite Audit telah melaksanakan program kerja komite seperti yang telah ditetapkan dalam Pedoman Kerja Komite Audit, antara lain melakukan review atas hasil pemeriksaan khusus SKAI, review Laporan Hasil Pemeriksaan yang dilakukan oleh Akuntan Publik dan pembahasan rekomendasi penunjukan Kantor Akuntan Publik Tahun Buku 2013 namun komite audit belum melakukan penelaahan dan evaluasi atas Laporan Keuangan Publikasi serta pemantauan atas tindak lanjut temuan-temuan yang ada.

2. Dalam menjalankan tugasnya, Komite Pemantau Manajemen Risiko telah mengacu pada Pedoman Kerja yang telah ditetapkan namun masih terdapat beberapa yang belum direalisasikan seperti melakukan evaluasi terhadap Laporan Profil Risiko.
3. Komite Remunerasi dan Nominasi selama tahun 2013 tidak mendokumentasikan hasil-hasil rapatnya.

4. PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara telah mengatur kebijakan mengenai penanganan dan penyelesaian mengenai benturan kepentingan pada Pedoman GCG dan selama tahun 2013 tidak terdapat peristiwa dan transaksi yang dapat menimbulkan adanya benturan kepentingan pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara.

5. PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN

Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No.8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/14/PBI/2006, PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara telah memiliki seorang Direktur untuk memegang posisi sebagai Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan dengan peran dan tanggung jawab meliputi pemantauan dan menjaga agar setiap aktivitas operasional bank senantiasa berjalan sesuai Peraturan Bank Indonesia serta ketentuan dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku. Untuk meningkatkan pelaksanaan fungsi kepatuhan termasuk dalam hal Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT), maka fungsi kepatuhan tersebut meliputi :

- Memantau dan mengkoordinasikan pelaksanaan APU dan PPT, menganalisa, mengevaluasi, dan melaporkan transaksi keuangan mencurigakan dan transaksi keuangan tunai sebagaimana diatur dalam ketentuan APU dan PPT ke Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK);
- Memantau dan memastikan pelaksanaan perjanjian dan komitmen dengan Bank Indonesia dan/atau kewenangan lainnya.

- Memastikan bahwa semua laporan aktivitas dan langkah-langkah perbaikan yang wajib dilaporkan telah dikirim ke Bank Indonesia dan/atau otoritas lainnya dan telah dilaporkan tepat waktu;
- Menyediakan pelatihan mengenai APU dan PPT bagi semua karyawan baru dan memberikan pelatihan penyegaran untuk semua front liner;
- Setiap bulan Direktur Kepatuhan menyampaikan Laporan Pelaksanaan Tugas dan Tanggungjawabnya kepada Direktur Utama dengan tembusan Dewan Komisaris PT. BPD Sultra;
- Laporan Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direktur Kepatuhan disampaikan kepada Bank Indonesia pada setiap semester.

6. PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN

- Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama. Sesuai dengan *Audit Charter*, SKAI memenuhi fungsinya sebagai Auditor Internal yang independen pada Satuan Kerja Operasional.
- Ruang lingkup Audit intern meliputi semua kegiatan Bank. Hasil audit dilaporkan kepada Direktur Utama, Dewan Komisaris melalui Komite Audit, Direktur Kepatuhan, dan pihak lain yang terkait (*auditee*).
- Tindak lanjut atas temuan hasil audit oleh *auditee* dipantau dan dianalisis secara berkala dan dilaporkan kepada Direksi dan pihak terkait lainnya (*auditee*).

7. PENERAPAN FUNGSI AUDIT EKSTERN

Dewan Komisaris mengusulkan Kantor Akuntan Publik (KAP) kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) berdasarkan rekomendasi dari Komite Audit yang akan melakukan audit laporan keuangan bank. Atas usulan tersebut disetujui KAP Drs.Bambang Sudaryono dan Rekan sebagai auditor eksternal untuk mengaudit Laporan Keuangan PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara Tahun Buku 2013. Sedangkan untuk kinerja SKAI Tahun 2013 telah dilakukan evaluasi oleh BPKP Provinsi Sulawesi Tenggara dengan rekomendasi akhir bahwa dari beberapa parameter dan indikator masih terdapat unsur-unsur SPFAIB yang belum dapat dilaksanakan secara optimal

Penunjukan Kantor Akuntan Publik serta BPKP tersebut telah memenuhi unsur kepatuhan terhadap ketentuan dan peraturan yang berlaku. KAP Drs. Bambang Sudaryono dan Rekan terdaftar di Bank Indonesia dan independen terhadap PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara sehingga tidak memiliki konflik kepentingan.

8. PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO TERMASUK SISTEM PENGENDALIAN INTERN

Dewan Komisaris dan Direksi telah berkomitmen untuk memantau penerapan Manajemen Risiko. Beberapa tindakan Manajemen Risiko yang telah dilaksanakan oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara adalah meningkatkan kapasitas sumber daya untuk mengenali dan memahami risiko sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia, yang terdiri dari risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko strategis, risiko kepatuhan, dan risiko reputasi.

Penerapan manajemen risiko PT. BPD Sultra sudah sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku serta telah berjalan cukup efektif dengan senantiasa memperhatikan pilar-pilar pengawasan, antara lain dalam hal :

- Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi dengan melakukan identifikasi dan pengendalian semua risiko pada Bank melalui koordinasi, rapat Dewan Komisaris dan rapat Direksi meskipun belum maksimal
- Melakukan evaluasi atas kecukupan kebijakan dan prosedur serta penetapan limit, secara efektif untuk memelihara kondisi internal Bank yang sehat dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku
- Melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko serta peningkatan penerapan manajemen risiko seiring dengan pertumbuhan bisnis Bank
- Penerapan pengendalian intern, tidak menunjukkan adanya kelemahan.
- Prosedur dan penerapan pengendalian intern pada PT. BPD Sultra cukup komprehensif sesuai dengan tujuan, ukuran dan kompleksitas usaha serta risiko yang dihadapi. Beberapa Auditor telah bersertifikat dan pendidikan akan terus dilakukan guna mendukung daya saing SDM yang berkualitas,

namun disisi lain masih terdapat kelemahan dalam pemantauan tindak lanjut hasil audit

- Berdasarkan profil risiko Triwulan IV Tahun 2013, peringkat risiko PT. BPD Sultra berada pada komposit **3 (Moderate)** dengan karakteristik bahwa dari risiko inherent kemungkinan kerugian yang akan dihadapi bank tergolong cukup tinggi selama periode waktu tertentu dimasa datang dan dari kualitas penerapan manajemen risiko secara komposit cukup memadai
- Dalam rangka peningkatan kualitas manajemen risiko perbankan Indonesia dan *corporate governance* serta sesuai ketentuan Bank Indonesia tentang pelaksanaan Kursus/Program Sertifikasi Manajemen Risiko maka PT. BPD Sultra telah mengikutkan para pengurus, pejabat bank dan karyawan bank pada level tertentu dalam program sertifikasi dimaksud yang diselenggarakan Badan Sertifikasi Manajemen Risiko serta program pemeliharaan sesuai tingkatan sertifikatnya. Sampai dengan 31 Desember 2013, pengurus, pejabat dan pegawai yang telah mengikuti dan lulus uji kompetensi dimaksud terdiri dari :
 - a. Level 1 sebanyak 195 Orang
 - b. Level 2 sebanyak 115 Orang
 - c. Level 3 sebanyak 34 Orang
 - d. Level 4 sebanyak 3 Orang

9. PENYEDIAAN DANA KEPADA PIHAK TERKAIT (*Related Party*) DAN PENYEDIAAN DANA BESAR (*Large Exposure*)

Aktivitas penyediaan dana khususnya pemberian kredit, PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara senantiasa memenuhi unsur kepatuhan seperti :

- Menjunjung tinggi prinsip *Prudential Banking* dengan mengacu pada Peraturan Bank Indonesia tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit dan ketentuan serta peraturan lainnya yang berlaku dan secara teratur melaporkan ke Bank Indonesia dengan tepat waktu.

- Sepanjang tahun 2013, tidak pernah melakukan pelanggaran atau pelampauan BMPK sesuai ketentuan.
- Telah memiliki Kebijakan, Sistem dan Prosedur tertulis dan jelas dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar.
- Diversifikasi penyediaan dana kepada pihak terkait lebih dominan dalam sektor konsumtif dengan jumlah yang cukup signifikan dibanding total penyediaan dana yaitu Kredit Konsumtif (75,95%), Kredit Modal Kerja (6,51%) dan Kredit Investasi (17,54%), sedang penyediaan dana debitur inti yang diberikan kepada Individu berdasarkan jenis penggunaannya yaitu Kredit Modal Kerja (66,90%) dan Kredit Investasi (33,10%).

Untuk lebih jelasnya penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar per 31 Desember 2013 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 10
Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait
dan Penyediaan Dana Besar

No.	PENYEDIAAN DANA	JUMLAH		Presentasi (%)
		DEBITUR	BAKI DEBET	
1.	Kepada Pihak Terkait			
	a. Kredit Konsumtif	49	Rp. 7.007.666.397,-	75.95 %
	b. Kredit Modal Kerja	1	Rp. 600.670.454,-	6.51 %
	c. Kredit Investasi	1	Rp. 1.618.750.000,-	17.54 %
2.	Kepada debitur inti :			
	a. Kredit Modal Krja	6	Rp. 55.777.417.178,-	66.90 %
	b. Kredit Investasi	9	Rp. 27.594.704.574,-	33.10 %

10. TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN BANK, LAPORAN PELAKSANAAN GCG DAN PELAPORAN INTERNAL

- PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara telah memberikan informasi tentang laporan keuangan dan non keuangan yang disusun dan disediakan dengan cara, jenis dan skala sebagaimana diatur dalam Peraturan

Bank Indonesia tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank serta telah dilaporkan secara tepat waktu. Informasi berupa laporan keuangan dan non keuangan kepada publik dapat diakses melalui *homepage* PT. BPD Sultra (www.banksultra.co.id) maupun media secara transparan, sehingga mudah diakses oleh semua stakeholder.

- Cakupan informasi keuangan dan non keuangan PT. BPD Sultra tersedia dalam system *core banking* yang telah dibangun dan dapat diakses oleh setiap pegawai dalam lingkup PT. BPD Sultra.
- Dalam hal transparansi pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG), PT. BPD Sultra telah menyusun laporan pelaksanaan GCG dengan cakupan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Laporan tersebut disertai dengan hasil assessment Bank terhadap pelaksanaan GCG sesuai dengan indikator yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. dan dilaporkan secara tepat waktu dan akurat sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia.
- Informasi Sistem manajemen mengenai laporan internal dilakukan sesuai prosedur serta disajikan secara tepat waktu, akurat dan memadai.

Hal lain yang dapat dijabarkan terkait dengan transparansi kondisi keuangan dan kondisi lainnya pada PT. BPD Sultra sebagai berikut :

a. Perubahan Bentuk Badan Hukum

Pada akhir tahun 2013 Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara berubah bentuk badan hukum dari PD. BPD Sulawesi Tenggara menjadi PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara atau disebut Bank Sultra dan telah mendapatkan persetujuan Gubernur Bank Indonesia dengan kronologis sebagai berikut :

- Sebagai tindak lanjut Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Tahun 2012 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum
- Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 3 Tahun 2012 tanggal 21 Juni 2012 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT).

- Pengajuan Surat Permohonan Persetujuan Prinsip Nomor 018/135.000/03/13/PRC tanggal 06 Maret 2013 kepada Bank Indonesia
- Pembuatan Akta Pendirian PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara Nomor 107 tanggal 21 Agustus 2013 oleh Notaris Irwan Addy Sanusi, SH di Kendari
- Pengesahan Akta Pendirian PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-44399.AH.01.01 Tahun 2013 tanggal 23 Agustus 2013 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan.
- Pengajuan surat permohonan pengalihan izin usaha kepada Bank Indonesia Nomor 082/135.000/09/13/PRC tanggal 03 September 2013
- Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 15/109/KEP.GBI/2013 tanggal 18 November 2013 perihal Pengalihan Izin Usaha dari PD. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara menjadi PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara.

Sejalan dengan perubahan bentuk badan usaha tersebut, maka aspek-aspek yang menyangkut fungsi perusahaan, struktur dan bentuk organisasi, sumber daya manusia (SDM), serta manajemen yang terkait antara satu dan yang lain harus diperbaharui. Disamping itu peraturan PT. BPD Sultra sudah wajib mengacu pada ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas yang berlaku.

Untuk itu, PT. BPD Sultra berkomitmen untuk melakukan perubahan-perubahan yang menyangkut fungsi, visi, dan misi serta strategi perusahaan, bentuk dan struktur organisasi yang disesuaikan dengan kondisi bisnis PT. BPD Sultra saat ini, serta kebutuhan SDM menurut kualifikasi yang diperlukan dan sesuai bidangnya.

b. Kepemilikan Saham

Sampai dengan 31 Desember 2013, pemegang saham PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara adalah Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Se Sulawesi Tenggara, dimana Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai saham terbesar dibanding pemegang saham lainnya dengan komposisi sebagai berikut :

Tabel 11
Komposisi Kepemilikan Saham

No.	PEMEGANG SAHAM	SETORAN MODAL (Rp)	%
1	Provinsi Sulawesi Tenggara	53.392.000,000.00	29.96%
2	Kab. Bombana	30.091,000,000.00	15.71%
3	Kab. Kolaka Utara	14.847.000,000.00	7.75%
4	Kab. Wakatobi	20.296.000.000,00	10.60%
5	Kab. Kolaka	13.696.000.000,00	7.15%
6	Kab. Konawe Selatan	10.900.000.000,00	5.69%
7	Kab. Buton	10.000.000.000,00	5.22%
8	Kab. Muna	6.854.000.000,00	3.58%
9	Kab. Konawe	7.735.000.000,00	4.04%
10	Pemda Kota Bau-Bau	6.750.000.000,00	3.52%
11	Kab. Buton Utara	5.000.000.000,00	2.61%
12	Kota Kendari	5.001.000.000,00	2.61%
13	Kab. Konawe Utara	3.000.000.000.00	1.57%
JUMLAH		191.562.000.000,00	100.00%

Dana setoran modal yang belum mendapatkan pengesahan RUPS Tahun 2012 adalah sebesar Rp.26.414.000.000,- termasuk saham dari Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur sebagai daerah pemekaran baru di Sulawesi Tenggara dan pada saat pelaksanaan RUPS Tahun Buku 2013 telah disahkan menjadi

setoran modal, sehingga jumlah setoran modal bank setelah mendapatkan persetujuan RUPS menjadi sebesar Rp.217.976.000.000,-.

c. Hubungan Keuangan dan Hubungan Keluarga

Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No.8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/14/PBI/2006, setiap anggota Dewan Komisaris tidak diperbolehkan memiliki hubungan keuangan dan/atau keluarga dengan anggota lain dari Dewan Komisaris dan/atau dengan anggota Direksi atau hubungan lainnya. Oleh karena itu, Komisaris Independen maupun Direksi harus mampu memenuhi tugas dan tanggung jawab mereka secara mandiri tanpa intervensi pihak luar.

Saat ini antara anggota Dewan Komisaris dengan anggota lainnya dan antara Dewan Komisaris dengan Direksi tidak terdapat hubungan keuangan dan hubungan keluarga, antara Direksi dengan Direksi lainnya tidak terdapat hubungan keluarga maupun hubungan keuangan, namun antara Pemegang Saham Pengendali dengan salah seorang Direksi Bank terdapat hubungan keluarga.

d. Paket Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Dewan Komisaris dan Direksi

Paket/Kebijakan remunerasi dan fasilitas lain yang diberikan kepada Dewan Komisaris dan Direksi sampai dengan 31 Desember 2013 berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 58 tahun 1999 tentang Dewan Pengawas dan Direksi Bank Pembangunan Daerah yang pelaksanaannya diatur dalam Surat Keputusan Direksi Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara atas persetujuan Dewan Pengawas dan telah mendapatkan persetujuan RUPS terlebih dahulu.

Remunerasi dan fasilitas lainnya yang diberikan kepada Dewan Komisaris dan Direksi PT. BPD Sultra Tahun 2013 adalah :

1. Dewan Pengawas

1. Honorarium
2. Tunjangan Hari Raya

3. Jasa Produksi Tahun Buku 2012
4. Kendaraan Dinas termasuk bahan bakar
5. Perjalanan Dinas

2. Direksi

1. Gaji
2. Bonus
3. Tunjangan Hari Raya
4. Uang cuti tahunan
5. Jasa Produksi Tahun Buku 2012
6. Kendaraan Dinas termasuk bahan bakar.
7. Rumah Dinas termasuk perabot untuk Direktur Utama
8. Biaya telephon
9. Perjalanan Dinas
10. Perawatan Kesehatan

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 12
Remunerasi dan Fasilitas Dewan Komisaris dan Direksi

Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lain	Jumlah diterima dalam 1 Tahun			
	Dewan Pengawas		Direksi	
	Orang	Rupiah	Orang	Rupiah
1. Remunerasi (gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem, dan fasilitas lainnya dalam bentuk non-natura)	3	Rp. 1.730.078.596	4	Rp. 4.388.484.203
2. Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, transportasi, asuransi kesehatan dan sebagainya) yang*): a. dapat dimiliki b. tidak dapat dimiliki	3	a. Rp. - b. Rp. 82.302.298	4	a. Rp. 93.050.221 b. Rp. 165.482.153
Total	3	Rp. 1.812.380.894	4	Rp. 4.647.016.577

Selama tahun 2013, Jumlah anggota Dewan Komisaris dan Direksi Bank yang menerima paket remunerasi dapat dikelompokkan dalam kisaran tingkat penghasilan sebagai berikut :

Tabel 13
Paket Remunerasi Yang Diterima Pada Tahun 2013

Jumlah Remunerasi per Orang dalam 1 tahun *)	Jumlah Direksi	Jumlah Dewan Komisaris
di atas Rp. 2 miliar	-	-
di atas Rp. 1 miliar s/d Rp. 2 miliar	3 orang	-
di atas Rp. 500 juta s/d Rp. 1 miliar	1 orang	3 orang
Rp. 500 juta ke bawah	-	-

*) yang diterima secara tunai

e. Share Options

Share Option merupakan opsi kepada anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif Bank untuk membeli saham melalui penawaran saham atau penawaran opsi saham dalam rangka pemberian kompensasi yang diberikan kepada anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif Bank. Opsi ini ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan Anggaran Dasar Bank, sampai dengan tanggal 31 Desember 2013, PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara tidak terdapat opsi saham bagi anggota Dewan Komisaris, Direksi, Pejabat Eksekutif, dan Kepala Unit Kerja lainnya.

Pengungkapan *share option* tahun 2013 sebagaimana dimaksud, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 14
Pengungkapan *Share Option* Tahun 2013

Keterangan>Nama	Jumlah Saham yang dimiliki (lembar saham)	Jumlah Opsi		Harga Opsi (Rupiah)
		yang diberikan (lembar saham)	yang telah dieksekusi (lembar saham)	
Dewan Pengawas	--	--	--	--
Direksi	--	--	--	--
Pejabat Eksekutif	--	--	--	--
Total	--	--	--	--

f. Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah

Rasio gaji tertinggi dan terendah yang diterima oleh anggota Dewan Komisaris, Direksi dan karyawan per bulan adalah sebagai berikut :

Tabel 15
Gaji Tertinggi dan Terendah

No.	JABATAN	GAJI	
		TERENDAH	TERTINGGI
1.	Pegawai	Rp. 2.042.976,-	Rp. 14.241.400,-
2.	Direksi	Rp. 40.833.930,-	Rp. 50.742.800,-
3.	Dewan Komisaris	Rp. 22.199.670,-	Rp. 24.666.300,-

Tabel 16
Rasio Gaji

RASIO GAJI		
No.	URAIAN	RASIO (%)
1.	Gaji Pegawai terendah dan tertinggi	14,35 %
2.	Gaji Direksi terendah dan tertinggi	80,47 %
3.	Gaji Dewan Komisaris terendah dan tertinggi	90,00 %
4	Gaji Pegawai tertinggi dan Direksi tertinggi	28,07 %

g. Jumlah Penyimpangan Internal (*Internal Fraud*)

Selama tahun 2013, tidak terdapat penyimpangan internal yang dilakukan, baik oleh pengurus maupun pegawai.

Pengungkapan *internal fraud* dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 17
Jumlah Penyimpangan Internal

(kasus)

Internal Fraud dalam 1 tahun	Jumlah kasus yang dilakukan oleh				
	Pengurus		Pegawai tetap		Pegawai tidak tetap
	Tahun sebelumnya	Tahun berjalan	Tahun sebelumnya	Tahun berjalan	Tahun sebelumnya
Total Fraud	--	--	2	0	--
Telah diselesaikan		--		-	
Dalam proses penyelesaian diinternal Bank	--	--	--	-	--
Belum	--	--	1	-	--

diupayakan penyelesaiannya					
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum		--	1	-	

h. Permasalahan Hukum

Selama tahun 2013 tidak terdapat kasus perdata dan pidana yang dihadapi, baik yang telah diselesaikan dan mempunyai kekuatan hukum tetap maupun dalam proses penyelesaian dengan tabel sebagai berikut :

Tabel 18
Jumlah Permasalahan Hukum

(kasus)

Permasalahan Hukum	Jumlah
	Perdata
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	--
Dalam proses penyelesaian	--
Total	--

i. Transaksi Yang Mengandung Benturan Kepentingan

Sampai dengan 31 Desember 2013, tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan yang melibatkan pengurus maupun karyawan Bank yang pengungkapannya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 19
Transaksi Yang Mengandung Benturan Kepentingan

No.	Nama dan Jabatan yang Memiliki Benturan Kepentingan	Nama dan Jabatan Pengambil Keputusan	Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (jutaan Rupiah)	Keterangan
--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--

j. Buy Back Shares dan Buy Back Obligasi Bank

Selama tahun 2013, PT. BPD Sultra belum menerbitkan obligasi, sehingga tidak terdapat *buy back shares* dan *buy back* Obligasi pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara.

k. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Politik

Sebagai bentuk pelaksanaan tanggung jawab sosial (*Corporate Social Responsibility*), PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara berpartisipasi aktif dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat di Sulawesi Tenggara, dengan fokus pada bidang keagamaan, sosial kemasyarakatan/pendidikan, olahraga, lingkungan dan bidang lainnya dengan total dana CSR yang disalurkan selama tahun 2013 sebesar Rp.1.116.293.250,- (satu milyar seratus enam belas juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 20
Penyaluran Dana CSR Tahun 2013

No.	URAIAN	JUMLAH
1.	Bidang Keagamaan	Rp.192.950.000,-
2.	Bidang Sosial Kemasyarakatan/ Pendidikan	Rp.638.483.250,-

3.	Bidang Olah Raga	Rp.191.900.000,-
4	Bidang Lingkungan	Rp. 15.500.000,-
5	Bidang lainnya	Rp. 77.460.000,-
Jumlah		Rp.1.116.293.250,-

I. Budaya Perusahaan

Dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan dan budaya perusahaan melalui perilaku utama yang ditujukan oleh setiap karyawan di lingkungan Bank, maka pada tanggal 06 April 2013 telah dilakukan launching Budaya Kerja dan Grooming Perusahaan. Budaya Perusahaan diperlukan untuk mencapai Visi dan Misi Bank yang tertuang pada serangkaian Nilai-Nilai Inti (*Core Values*) dan Perilaku Utama yang disepakati dan berupaya untuk diaktualisasikan dalam lingkungan PT. BPD Sultra terutama pada setiap individu.

Nilai-Nilai Inti Budaya Perusahaan PT. BPD Sultra yaitu *Trust, Integrity, Professional, Synergy, Service Excellence* yang disingkat dengan “**TIPSS**”. Budaya Perusahaan akan terwujud menjadi karakter unggul PT. BPD Sultra yang dapat dilihat secara kasat mata melalui kebiasaan, keyakinan dan simbol-simbol. Nilai-nilai inti Budaya Perusahaan tersebut diwujudkan melalui Perilaku Utama yang ditunjukkan oleh setiap karyawan di lingkungan Bank.

Nilai-nilai Budaya Perusahaan	Perilaku Utama
TRUST	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mampu menjaga rahasia bank dan perusahaan 2. Membangun hubungan yang tulus dan saling percaya 3. Mengutamakan keterbukaan
INTEGRITY	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jujur 2. Adil dan bijaksana 3. Bertanggung jawab

PROFESSIONAL	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan Kompetensi 2. Disiplin 3. Inovatif & Kreatif
SYNERGY	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komunikasi efektif 2. Saling mendukung & menghargai 3. Membangun jaringan
SERVICE EXCELLENCE	<ol style="list-style-type: none"> 1. Proses yang cepat, tepat, dan akurat 2. Memahami kebutuhan pelanggan 3. Melayani dengan ramah dan kekeluargaan

Pengertian Perilaku Utama dalam Nilai-nilai Budaya Perusahaan Bank Sultra meliputi:

Nilai-nilai Budaya Perusahaan	Perilaku Utama
TRUST	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mampu menjaga rahasia bank dan perusahaan <ul style="list-style-type: none"> o Sesuai dengan undang-undang, menjaga rahasia bank berarti menjaga rahasia segala hal yang berkaitan dengan kegiatan perbankan termasuk proses dan rahasia nasabah, sedangkan perusahaan dalam hal ini adalah PT. BPD Sultra. 2. Membangun hubungan yang tulus dan saling percaya <ul style="list-style-type: none"> o Membangun hubungan dengan semua pihak berdasarkan itikad baik dan saling menghargai. 3. Mengutamakan keterbukaan <ul style="list-style-type: none"> o Memberikan informasi dan penjelasan yang diperlukan secara proporsional sesuai dengan batas-batas yang telah ditentukan dengan tetap menjaga kerahasiaan bank dan perusahaan.

INTEGRITY

1. Jujur
 - Dapat dipercaya, selaras dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan.
 - Menjunjung tinggi kebenaran sesuai dengan kode etik.
 - Berbicara secara realistik didukung dengan fakta dan data
2. Adil dan bijaksana
 - Berperilaku dan memperlakukan orang lain secara setara dan proporsional.
 - Menghargai persamaan hak dan kewajiban.
 - Mempertimbangkan segala sesuatu secara obyektif sebelum mengambil keputusan / bertindak.
3. Bertanggung jawab
 - Bertanggung jawab terhadap diri sendiri, pekerjaan, dan perusahaan.
 - Bertanggung jawab terhadap setiap keputusan yang diambil

PROFESSIONAL

1. Meningkatkan Kompetensi
 - Senantiasa meningkatkan kemampuan diri dalam keterampilan, pengetahuan, dan keahlian baik secara formal maupun informal untuk terus berprestasi
2. Disiplin
 - Menghargai waktu dalam menjalankan tugas.
 - Secara konsisten menjalankan peraturan perusahaan.
 - Memiliki komitmen terhadap tugas dan pekerjaan
3. Inovatif & Kreatif
 - Menghargai ide-ide untuk perbaikan.
 - Selalu menumbuhkan rasa ingin tahu dan bersikap terbuka terhadap perubahan.

	<ul style="list-style-type: none"> ○ Proaktif mengembangkan peluang untuk perbaikan.
<p>SYNERGY</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komunikasi efektif <ul style="list-style-type: none"> ○ Menyampaikan informasi dan/atau gagasan dengan efektif dan terbuka. ○ Bersedia mendengarkan dan menghargai pendapat orang lain. ○ Memberikan akses informasi bagi setiap orang dalam perusahaan sesuai dengan batasan-batasan yang berlaku. 2. Saling mendukung & menghargai <ul style="list-style-type: none"> ○ Mau bekerja sama dengan orang lain dan membangun semangat kebersamaan untuk meraih keberhasilan. ○ Mau membantu orang lain yang mengalami kesulitan. ○ Memberikan penghargaan atas prestasi. ○ Memberdayakan orang lain untuk maju. 3. Membangun jaringan <ul style="list-style-type: none"> ○ Memperluas kerjasama kemitraan yang saling menguntungkan untuk memberikan hasil optimal baik terhadap individu, team kerja, dan perusahaan.
<p>SERVICE EXCELLENCE</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Proses yang cepat, tepat, dan akurat <ul style="list-style-type: none"> ○ Melakukan pekerjaan dengan cepat sesuai dengan batasan waktu, menggunakan cara/metode yang tepat dan meminimalisasi tingkat kesalahan dengan meningkatkan ketelitian. 2. Memahami kebutuhan pelanggan <ul style="list-style-type: none"> ○ Menghormati dan memberikan perhatian kepada nasabah sebagai mitra. ○ Selalu mengupayakan solusi terbaik bagi nasabah.

	<p>3. Melayani dengan ramah dan kekeluargaan</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Merupakan ciri khas pelayanan bank Sultra dengan senantiasa melayani dengan baik untuk menjamin kepuasan nasabah dan memperlakukan nasabah sebagaimana layaknya keluarga dengan tetap memperhatikan aspek-aspek profesional.
--	---

Beberapa Contoh Perilaku yang mencerminkan TIPSS yang dilaksanakan di lingkungan Bank Sultra antara lain :

Nilai-nilai Budaya Perusahaan	Contoh Perilaku
TRUST	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjaga Informasi Nasabah 2. Menjaga kepercayaan dalam hal pribadi / individu sbg cermin perusahaan 3. Terbuka tanpa mengorbankan kerahasiaan bank
INTEGRITY	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bersedia menerima koreksi / kritik yang membangun 2. Adil & Bijaksana dalam membuat suatu keputusan 3. Mampu mengambil kebijaksanaan yang dapat dipertanggung jawabkan dalam menghadapi hal-hal khusus
PROFESSIONAL	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terus menerus belajar dan berusaha untuk menjadi lebih baik, tidak hanya melalui training namun juga melalui kegiatan non training seperti coaching, proyek khusus dll. 2. Disiplin dalam hal kehadiran, menyelesaikan pekerjaan tepat waktu 3. Memberikan masukan/ide untuk perbaikan baik untuk produk, layanan atau proses bisnis

SYNERGY	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan komunikasi / sosialisasi sebelum pemberlakuan peraturan/ketentuan baru 2. Mempererat kerjasama antar departemen/seksi/unit kerja 3. Membangun/memanfaatkan jaringan individu karyawan (baik operasional maupun non operasional) untuk meningkatkan bisnis perusahaan baik
SERVICE EXCELLENCE	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat standard pelayanan (SLA) untuk proses bisnis kunci. 2. Meningkatkan pelayanan di Customer service

m. Penerapan Strategi Anti Fraud

Direksi dan Dewan Komisaris menyadari pentingnya tanggung jawab dalam melindungi aset dan seluruh simpanan nasabah yang ada pada PT. BPD Sultra. Salah satu prioritas utama bank adalah memastikan standar pelayanan dan transparansi sebagai pendukung tata kelola perusahaan yang baik dengan tetap mengutamakan kejujuran dan akuntabilitas yang tinggi dalam setiap aktivitas operasional PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara.

Sejalan dengan hal tersebut dan sesuai Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/28/DPNP tanggal 09 Desember 2011 perihal Penerapan Strategi *Anti Fraud* bagi Bank Umum, maka PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara telah memberlakukan Pedoman Penerapan Strategi Anti Fraud melalui Surat Keputusan Direksi Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara Nomor 146/Kpts/Dir.BPD/2012 tanggal 29 Mei 2012.

Penerapan Strategi *Anti Fraud* ini dimaksudkan untuk :

1. Menetapkan langkah-langkah dalam rangka mengurangi potensi risiko terjadinya fraud yang mencakup *fraud awareness*, identifikasi kerawanan dan *know your employee*.
2. Menetapkan langkah-langkah dalam rangka identifikasi dan menemukan *fraud* dalam kegiatan usaha bank, yang mencakup kebijakan dan mekanisme *whistleblowing*, *surprise audit* dan *surveillance system*.

3. Menetapkan langkah-langkah dalam rangka menggali informasi (investigasi) sistem pelaporan dan pengenaan sanksi atas fraud dalam kegiatan usaha Bank.
4. Menetapkan langkah-langkah dalam rangka memantau dan mengevaluasi *fraud* serta mekanisme tindaklanjut.
5. Menjadi pedoman dalam melakukan pengendalian melalui upaya-upaya pencegahan, mendeteksi dan melakukan investigasi serta memperbaiki sistem sebagai bagian dari strategi yang bersifat integral dalam mengendalikan *fraud*.

Struktur strategi *anti fraud* secara utuh menggabungkan prinsip dasar dari Manajemen Risiko khususnya pengendalian intern dan tata kelola yang baik. Impelementasi strategi *anti fraud* dalam bentuk sistem pengendalian *fraud* dijabarkan melalui 4 (empat) pilar strategi yang saling berkaitan, yaitu :

- Pencegahan;
- Deteksi;
- Investigasi, Pelaporan dan Sanksi;
- Pemantauan, Evaluasi dan Tindaklanjut.

11. RENCANA STRATEGIS BANK

Rencana Strategis Bank PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara baik rencana jangka panjang (*corporate plan*) maupun rencana jangka menengah dan pendek (*business plan*) disusun berdasarkan asumsi-asumsi secara realistis dan mempertimbangkan faktor eksternal dan internal serta prinsip kehati-hatian.

11.1 Rencana jangka panjang (*corporate plan*)

Rencana Jangka Panjang atau Rencana Korporasi (*corporate plan*) Bank adalah sebagai berikut :

- Menjadi bank umum nomor 1 di Sulawesi Tenggara.
- Mempertahankan kondisi keuangan yang sehat, stabil dan tumbuh secara wajar.
- Meningkatkan Good Corporate Governance dan Manajemen Risiko dalam pengelolaan Bank.

- Target modal dasar bank terpenuhi sampai tahun 2018 yaitu sebesar Rp750.000.000.000,- (tujuh ratus lima puluh miliar rupiah).
- Penerimaan gaji seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kabupaten/Kota dan Kecamatan Se Sulawesi Tenggara melalui BPD Sultra.
- Meningkatkan akses masyarakat di Sulawesi Tenggara terhadap layanan perbankan.
- Memiliki sumber daya manusia yang professional, baik kuantitas maupun kualitas.
- Produk Bank yang lebih beragam dan bersaing.
- Memiliki teknologi yang handal sesuai kebutuhan konsumen.
- Pengembangan sistem pembayaran seperti Payment point (Telkom dan PLN), Electronic Data Capture (EDC), dan Kartu Kredit.
- Pembukaan Unit Usaha Syariah.
- Menjadi Apex BPR di Sulawesi Tenggara

11.2. Rencana jangka menengah dan pendek (*business plan*)

Rencana Jangka Menengah dan Rencana Jangka Pendek (*business plan*)

PT. BPD Sultra adalah :

1. Memastikan adanya tambahan modal disetor sesuai kerjasama yang telah disepakati dengan tetap menjaga hubungan baik dan berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dalam penyusunan APBD.
2. Secara konsisten memelihara pertumbuhan kredit sekurang-kurangnya sebesar 20% setiap tahun dengan diversifikasi portofolio kredit yaitu kredit produktif meningkat sebesar 10% setiap tahun atau sebesar 40% pada tahun 2015 dan kredit konsumtif meningkat sebesar 60% pada tahun 2015.
3. Penghimpunan dana masyarakat diluar dana pemerintah adalah sebesar 70% pada tahun 2015.
4. Pemberlakuan *Key Performance Indicator* (KPI) untuk penilaian kinerja setiap pegawai.

5. Pemenuhan Sumber Daya Manusia yang berkualitas sesuai struktur organisasi bank.

KESIMPULAN

Berdasarkan penilaian pelaksanaan GCG pada PT. BPD Sultra dapat disimpulkan bahwa hasil self assessment yang dilakukan PT. BPD Sultra berada pada peringkat “BAIK” dengan nilai komposit 1.55 dengan matriks ringkasan perhitungan nilai komposit *self assessment* pelaksanaan *Good Corporate Governance* adalah :

No.	ASPEK YANG DINILAI	BOBOT	SKOR	NILAI
		(a)	(b)	(a) x (b)
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggungjawab Dewan Komisaris	10.00%	1.61	0.16
2	Pelaksanaan Tugas dan Tanggungjawab Direksi	20.00%	1.32	0.26
3	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite	10.00%	2.46	0.25
4	Penanganan Benturan Kepentingan	10.00%	2.22	0.22
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank	5.00%	1.25	0.06
6	Penerapan Fungsi Audit Intern	5.00%	1.94	0.10.
7	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	5.00%	1.00	0.05
8	Penerapan Fungsi Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern	7.50%	1.78	0.13
9	Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait (<i>Related Party</i>) dan Debitur Besar (<i>Large Exposures</i>)	7.50%	1.11	0.08
10	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank, Laporan Pelaksanaan GCG dan Laporan Internal.	15.00%	1.08	0.16
11	Rencana Strategis Bank	5.00%	1.28	0.06
	NILAI KOMPOSIT	100.00%		1.55

Kesimpulan:

Berdasarkan analisis terhadap seluruh kriteria/indikator penilaian Good Corporate Governace, disimpulkan bahwa:

Governance Structure

Faktor-faktor positif aspek *governance structure* Bank adalah:

- Pelaksanaan Tugas dan Tanggungjawab Dewan Komisaris :
 - a. Semua Dewan Komisaris berdomisili di indonesia
 - b. Jumlah anggota Dewan Komisaris Bank Sultra adalah 3 orang dan 2 orang diantaranya adalah Komisaris Independen
 - c. Dewan Komisaris yang ada tidak merangkap jabatan pada Lembaga/Perusahaan lain dan atau melaksanakan fungsi pengawasan pada 1 perusahaan anak bukan Bank yang dikendalikan Bank
 - d. Komisaris independen merangkap jabatan paling banyak pada 2 komite Bank
 - e. Tidak ada hubungan keluarga antara komisaris dan direksi
 - f. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris telah disahkan sejak tahun 2007
 - g. Seluruh anggota Dewan Komisaris lulus fit and proper test dan selalu mengikuti workshop, seminar maupun lokakarya dalam rangka peningkatan kualitas.
 - h. Salah seorang anggota Dewan Komisaris berasal dari mantan Direksi namun telah menjalani masa tunggu lebih dari 1 tahun.
 - i. Tidak ada anggota Dewan Komisaris yang memiliki hubungan dengan Dewan Komisaris lainnya, Direksi maupun dengan pemegang saham pengendali dari Bank
 - j. Anggota Dewan Komisaris memiliki kompetensi yang memadai dan relevan dengan jabatannya
 - k. Pada tahun 2013 anggota Dewan Komisaris mengikuti pelatihan RBBR dan GCG serta refreshment Sertifikasi Manajemen Risiko.
 - l. Komposisi Dewan Komisaris telah memenuhi ketentuan tanpa adanya intervensi dari pemilik

- Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi :
 - a. Pada akhir tahun 2013, Jumlah direksi adalah 4 orang.
 - b. Semua anggota Direksi berdomisili di Indonesia
 - c. Semua anggota direksi telah memenuhi persyaratan 5 tahun sebagai pejabat eksekutif.
 - d. Seluruh direksi tidak memiliki rangkap jabatan sebagai Dewan Komisaris maupun pejabat eksekutif pada Bank, Perusahaan, atau lembaga lain.
 - e. Anggota Direksi tidak ada yang memiliki saham pada perusahaan lain.
 - f. Semua anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Direksi lainnya atau Dewan Komisaris, namun terdapat 1 anggota Direksi yang memiliki hubungan keluarga dengan Pemegang Saham Pengendali Bank.
 - g. Pengangkatan anggota Direksi telah memperhatikan rekomendasi komite nominasi dan remunerasi
 - h. Pedoman dan Tata Kerja Direksi telah disahkan dan diberlakukan
 - i. Anggota Direksi tidak menggunakan penasehat atau jasa profesional sebagai konsultan
 - j. Seluruh anggota Direksi memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai. LHKPN seluruh anggota Direksi telah dilaporkan pada instansi yang berwenang dan dipublikasikan.
 - k. Direktur Utama Bank Sultra berasal dari pihak independen terhadap pemegang saham pengendali.
 - l. Seluruh anggota Direksi telah lulus Fit and Proper Test dan telah memperoleh surat persetujuan dari Bank Indonesia
 - m. Direksi memiliki kompetensi yang memadai dan relevan dengan jabatannya
 - n. Direksi memiliki kemauan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan untuk peningkatan pengetahuan tentang perbankan
 - o. Direksi telah membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi
 - p. Komposisi Direksi telah memenuhi ketentuan tanpa adanya intervensi pemilik

- Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite
 - a. Anggota Komite Audit memiliki keahlian sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum
 - b. Komite Audit diketuai oleh Dewan Komisaris Independen
 - c. Anggota Komite Audit adalah Independen dan Pihak independen
 - d. Memiliki Integritas, akhlak, dan moral yang baik
 - e. Komite Pemantau Risiko diketuai oleh Komisaris Independen
 - f. Anggota Komite Pemantau Risiko berasal dari pihak independen
 - g. Memiliki Integritas, akhlak, dan moral yang baik menjadi syarat untuk menjadi anggota Komite Pemantau Risiko
 - h. Komite Remunerasi dan nominasi diketuai oleh Dewan Komisaris Independen
 - i. Anggota komite Remunerasi dan Nominasi hanya 3 orang yaitu 1 orang Komisaris Independen, 1 orang Komisaris Non Independen, dan 1 orang Pejabat Eksekutif
- Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank
 - a. Bagian Kepatuhan independen terhadap satuan kerja operasional
 - b. Pengangkatan, pemberhentian Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia
 - c. Bank telah menyediakan sumber daya manusia yang berkualitas pada satuan kerja Kepatuhan
- Penerapan Fungsi Audit Intern
 - a. Struktur organisasi SKAI Bank telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku
 - b. Bank telah menyusun Piagam Audit Intern dan telah dikinikan pada tahun 2012, membentuk SKAI, serta telah menyusun panduan audit intern
 - c. SKAI Independen terhadap satuan kerja operasional
- Penerapan Fungsi Audit Ekstern

Akuntan Publik yang ditunjuk telah memenuhi aspek-aspek yang dipersyaratkan

- Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait dan Penyediaan Dana Besar
Bank telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai untuk penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar.
- Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan
 - a. Bank menyusun laporan GCG setiap akhir tahun buku dan telah memenuhi ketentuan yang berlaku
 - b. Laporan internal telah tersedia secara lengkap, akurat, dan tepat waktu yang didukung oleh sistem informasi bank yang memadai
 - c. Sistem informasi manajemen telah didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten serta IT security sistem memadai
- Rencana Strategis Bank
 - a. Bank Sultra telah menyusun Corporate plan dan business plan
 - b. Rencana strategis Bank didukung sepenuhnya oleh pemilik

Faktor-faktor negatif aspek *governance structure* Bank adalah

- Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris
Dewan Komisaris berjumlah 3 (tiga) orang yang berarti telah memenuhi standar minimum yang ditetapkan namun belum maksimal dibandingkan dengan jumlah Direksi yang berjumlah 4 (empat) orang.
- Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite
 - a. Anggota Komite Pemantau Risiko terdiri dari seorang komisaris independen, seorang pihak independen yang ahli dalam bidang keuangan, serta pihak independen di bidang manajemen risiko namun belum memiliki keahlian khusus terkait manajemen risiko.
 - b. Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi yaitu Drs. H. Jahja Mallisa (Komisaris Independen), Ir. H.Zainal Abidin (Anggota Dewan Komisaris), dan Hadiman (Kepala Divisi SDM dan Umum) namun belum memiliki keahlian dalam bidangnya.
 - c. Pejabat Eksekutif ataupun perwakilan pegawai yang menjadi anggota komite remunerasi dan nominasi belum ada yang memiliki sertifikat/pendidikan tentang remunerasi

- **Penanganan Benturan Kepentingan**
Pedoman kebijakan, sistem dan prosedur tentang penyelesaian benturan kepentingan diatur dalam Pedoman GCG Bank Sultra, namun dalam pelaksanaannya pengungkapan benturan kepentingan belum sepenuhnya termuat dalam risalah rapat
- **Penerapan Fungsi Audit Intern**
Sumberdaya audit internal belum sepenuhnya menguasai bidang tugasnya, namun telah dilakukan pendidikan yang berkelanjutan.
- **Penerapan manajemen risiko termasuk Sistem Pengendalian Intern**
 - a. SKAI, SKMR, dan Komite Manajemen Risiko telah dibentuk sesuai struktur organisasi PT. BPD Sultra namun belum berfungsi secara optimal.
 - b. Bank telah memiliki kebijakan, prosedur, dan penetapan limit risiko namun dalam penerapannya belum dilakukan dengan maksimal.
- **Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan**
Transparansi dan Kondisi Keuangan serta non keuangan mengacu pada ketentuan Bank Indonesia.

Governance Process

Faktor-faktor positif aspek *governance process* Bank adalah

- **Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris**
 - a. Penggantian dan pengangkatan Dewan Komisaris telah memperhatikan rekomendasi komite nominasi dan remunerasi serta telah memperoleh persetujuan dari RUPS
 - b. Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan Bank, pengambilan keputusan dilakukan oleh Direksi, namun untuk pemberian kredit kepada pihak terkait harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris.
 - c. Tidak terdapat pelanggaran peraturan perundang-undangan yang dapat membahayakan kelangsungan bank.
 - d. Dewan Komisaris melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen

- e. Dewan Komisaris membentuk Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi.
- f. Pengangkatan anggota komite dilakukan berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris
- g. Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan bank untuk kepentingan pribadi
- h. Dewan Komisaris hanya menikmati fasilitas yang telah ditetapkan berdasarkan RUPS
- i. Pemilik tidak melakukan intervensi terhadap pelaksanaan tugas Dewan Komisaris yang mengakibatkan kegiatan operasional Bank terganggu
- Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi
 - a. Direksi telah mengangkat anggota komite berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris
 - b. Anggota Direksi tidak memberikan kuasa kepada pihak lain.
 - c. Direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan dan kepengurusan Bank
 - d. Direksi dalam mengelola Bank telah sesuai dengan Wewenang dan tanggung jawabnya berdasarkan Anggaran Dasar dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku
 - e. Direksi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen terhadap pemegang saham
 - f. Penyediaan data Bank dapat diakses melalui jaringan sehingga Dewan Komisaris dapat mengakses kapan saja saat dibutuhkan
 - g. Kebijakan dan keputusan strategis Direksi diputuskan melalui rapat Direksi
 - h. Tidak ada Direksi yang memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi
 - i. Tidak ada Direksi yang mengambil keuntungan pribadi dari Bank selain remunerasi dan fasilitas yang ditetapkan
 - j. Tidak ada intervensi pemilik modal terhadap pelaksanaan tugas Direksi
- Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite
 - Penunjukan KAP telah memperhatikan rekomendasi Komite Audit

- Penanganan Benturan Kepentingan
 - Selama tahun 2013 tidak terdapat kegiatan yang menyebabkan benturan kepentingan.
- Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank
 - Selama tahun 2013, Direktur Kepatuhan telah melaksanakan dan memastikan setiap kegiatan usaha Bank tidak menyimpang dari ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, melalui hasil kajian yang disampaikan kepada unit kerja terkait. Penyampaian Laporan Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan telah dikirim ke Bank Indonesia setiap semester dan ke Direktur Utama setiap bulan
- Penerapan Fungsi Audit Ekstern
 - a. Akuntan Publik yang ditunjuk Bank telah terdaftar di Bank Indonesia.
 - b. Penunjukan Akuntan Publik dan KAP yang sama telah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku
 - c. Akuntan publik telah bekerja sesuai dengan prosedur kerja yang telah ditetapkan.
 - d. Hasil Audit dan Management Letter telah dilaporkan kepada Bank Indonesia
- Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait dan Penyediaan Dana Besar
 - a. Penyediaan dana kepada pihak terkait atau penyediaan dana besar telah dilaksanakan dengan prinsip kehati-hatian
 - b. Pengambilan keputusan dalam penyediaan dana dilakukan secara independen.
- Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan, Laporan Pelaksanaan GCG dan pelaporan Internal
 - a. Laporan keuangan telah dipublikasikan secara triwulanan melalui media yang ditetapkan dan telah dilaporkan ke Bank Indonesia.
 - b. Bank telah menyampaikan informasi produk sesuai ketentuan Bank Indonesia.
 - c. Tata cara pengaduan nasabah dan penyelesaian sengketa telah dilakukan sesuai ketentuan Bank Indonesia

- d. Penyusunan dan penyajian laporan transparansi telah disesuaikan dengan ketentuan Bank Indonesia
- e. Penyusunan Laporan GCG telah memenuhi ketentuan yang berlaku dan telah dipublikasikan tepat waktu melalui home page Bank.
- f. Jika terdapat perbedaan peringkat Faktor GCG dalam hasil penilaian self assessment yang dilakukan oleh Bank Indonesia akan dilakukan revisi sesuai dengan hasil penilaian Bank Indonesia dan hasil revisi tersebut akan disampaikan kepada Bank Indonesia dan dipublikasikan melalui home page Bank.
- Rencana Strategis Bank
 - a. Penyusunan rencana bisnis bank telah disetujui oleh Dewan Komisaris
 - b. Bank telah mengkomunikasikan Rencana Bisnis Bank kepada Pemegang Saham dan seluruh jenjang organisasi
 - c. Telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Faktor-faktor negatif aspek *governance process* Bank adalah

- Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris
 - a. Penerapan pelaksanaan GCG dalam seluruh kegiatan Bank Sultra belum sepenuhnya dimengerti oleh semua unit kerja pada setiap jenjang organisasi
 - b. Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap tugas dan tanggung jawab Direksi namun belum maksimal
 - c. Dewan Komisaris telah mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis namun belum maksimal
 - d. Komisaris melalui Komite Audit telah melakukan pertemuan untuk membahas laporan audit, namun tindak lanjut penyelesaiannya belum maksimal.
 - e. Komite-Komite telah menjalankan tugasnya namun belum maksimal, tahun 2013 tidak terdapat dokumentasi pelaksanaan rapat yang dilakukan oleh Komite Remunerasi dan Nominasi
 - f. Pedoman dan tata kerja Dewan Komisaris telah disahkan sejak Tahun 2007

- g. Pada tahun 2013 rapat Dewan komisaris dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali dengan pembahasan sesuai dengan agenda rapat
- h. Keputusan rapat Dewan Komisaris berdasarkan musyawarah mufakat
- Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi
 - a. Direksi telah melaksanakan prinsip GCG namun belum sepenuhnya dituangkan di setiap kegiatan
 - b. Temuan audit dan rekomendasi dari SKAI, auditor eksternal, dan hasil pengawasan Bank telah ditindaklanjuti namun belum sepenuhnya.
 - c. Hasil rapat Direksi telah dituangkan dalam Risalah Rapat, namun belum memuat dinamika rapat tersebut.
 - d. Risalah Rapat belum memuat evaluasi tindak lanjut atas keputusan/ hasil rapat yang telah dilaksanakan sebelumnya
- Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite Audit
 - a. Komite audit telah memantau dan mengevaluasi perencanaan dan pelaksanaan audit dan tindak lanjut namun belum maksimal
 - b. Komite Audit belum melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap tindak lanjut hasil temuan.
 - c. Komite Pemantau Risiko telah melakukan pemantauan dan evaluasi secara rutin namun belum maksimal
 - d. Evaluasi kebijakan remunerasi untuk pejabat eksekutif dan pegawai tidak ada.
 - e. Komite Remunerasi dan Nominasi belum menyusun prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada RUPS
 - f. Komite nominasi telah memberikan rekomendasi calon anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi namun penyampaiannya belum sesuai dengan prosedur.
- Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank
 - Satuan kerja kepatuhan telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai ketentuan namun belum maksimal

- Penerapan Fungsi Audit Intern
 - a. Secara umum struktur pengendalian intern dalam setiap tingkat manajemen telah berjalan walaupun belum maksimal. Dewan Komisaris, belum maksimal dalam memberikan arahan dan review atas tindak lanjut hasil temuan SKAI
 - b. Bank telah menerapkan fungsi audit intern namun dalam pelaksanaannya terdapat beberapa unsur yang belum dilaksanakan secara optimal
 - c. Bank telah melakukan kaji ulang oleh pihak eksternal setiap tiga tahun sekali
 - d. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh auditor internal, penyusunan rencana pemeriksaan SKAI Bank belum sepenuhnya mengacu pada PBI tentang Penugasan Direktur Kepatuhan dan Penerapan Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Umum, kecukupan ruang lingkup audit dan kedalaman pemeriksaan SKAI belum dilakukan secara optimal
 - e. Anggota SKAI diikutkan dalam pendidikan audit secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan mutu sumber daya manusia namun hasil dari pendidikan tersebut belum diterapkan secara optimal
 - f. SKAI telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku namun belum dilakukan secara optimal.
 - g. Pelaksanaan pemantauan, analisis dan perkembangan tindak lanjut belum maksimal
 - h. Pengkinian sistem dan prosedur kerja belum dilaksanakan secara berkala
- Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem Pengendalian Intern
 - a. Kebijakan manajemen risiko telah disetujui Dewan Komisaris, evaluasi atas pelaksanaan kebijakan belum maksimal dan belum dituangkan dalam bentuk tertulis
 - b. Direksi telah menyusun kebijakan manajemen risiko, menyusun dan menetapkan mekanisme persetujuan transaksi, menetapkan struktur organisasi termasuk wewenang dan tanggung jawab pada setiap jenjang jabatan terkait penerapan manajemen risiko, serta memastikan seluruh risiko material dan dampak yang ditimbulkan oleh risiko. Namun dari segi

pengkinian kebijakan, strategi, dan kerangka manajemen risiko belum dilakukan dalam frekuensi yang sering.

- Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait dan Penyediaan Dana Besar
Bank memiliki kebijakan & prosedur tertulis dan jelas untuk penyediaan dana kepada pihak terkait dan dana besar serta telah disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun belum dilakukan evaluasi secara berkala.
- Rencana Strategis Bank
 - a. Penyusunan Rencana Bisnis Bank telah memperhatikan prinsip kehati-hatian namun tidak diikuti dengan responsif terhadap perubahan internal dan eksternal. Telah melaksanakan rencana bisnis bank secara efektif
 - b. Telah melaksanakan rencana bisnis bank namun belum optimal
 - c. Dewan Komisaris telah melakukan pengawasan terhadap Rencana Bisnis Bank namun belum maksimal
 - d. Pemilik telah menunjukkan keseriusan dalam mendukung rencana strategis bank, namun belum optimal.

Governance Outcome

Faktor-faktor positif aspek *governance outcome* Bank adalah

- Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris
Dalam laporan pelaksanaan GCG yang dimuat dalam laporan tahunan maupun laporan pelaksanaan GCG, telah diungkapkan: Kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris, hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya dan anggota Direksi, remunerasi dan fasilitas lain diungkapkan dalam laporan tahunan.
- Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi
 - a. Pelaksanaan Tugas Direksi dipertanggungjawabkan dalam RUPS Tahun Buku 2013 yang dilaksanakan pada tanggal 26 Februari 2014
 - b. Pertanggungjawaban Direksi telah diterima oleh pemegang saham
 - c. Dalam laporan pelaksanaan GCG telah termuat bahwa Direksi tidak memiliki saham pada PT. BPD Sultra, pada Bank atau perusahaan lain baik

- didalam maupun diluar negeri. Terdapat salah satu anggota Direksi yang mempunyai hubungan keluarga dengan Pemegang Saham Pengendali.
- d. Remunerasi dan fasilitas lain telah diatur sesuai dengan ketentuan
 - e. Peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dalam pengelolaan Bank telah ditunjukkan dari peningkatan kinerja perusahaan.
 - f. Pengetahuan, keahlian, dan kemampuan seluruh karyawan bank telah ditunjukkan dengan peningkatan kinerja individu sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing karyawan
- Penanganan Benturan Kepentingan
 - a. Kegiatan operasional bank bebas dari intervensi pemilik
 - b. Selama tahun 2013 tidak terdapat benturan kepentingan
 - Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank
 - a. Bank menyampaikan Laporan Pelaksanaan Tugas Direktur Kepatuhan kepada Direktur Utama setiap bulan termasuk kepada Dewan Komisaris dan Pihak Lainnya serta kepada Bank Indonesia setiap semester.
 - b. Laporan pelaksanaan Tugas Direktur Kepatuhan telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia
 - Penerapan fungsi audit intern
 - a. Hasil temuan audit intern bank telah disampaikan dalam RUPS sebagai pertanggungjawaban Direksi.
 - b. SKAI telah obyektif dalam melakukan audit
 - Penerapan fungsi audit ekstern
 - a. Hasil audit dan management letter telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan telah dilaporkan secara tepat waktu kepada Bank Indonesia
 - b. Cakupan hasil audit telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku
 - c. Auditor bertindak obyektif dalam bekerja
 - Penerapan manajemen risiko termasuk Sistem Pengendalian Intern
 - a. Komisaris dan Direksi telah melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko
 - b. Bank melakukan aktivitas bisnis sesuai dengan kemampuan permodalan bank

- Penyediaan dana kepada pihak terkait (related party) dan penyediaan dana besar (large exposure)
 - a. Penyediaan dana kepada pihak terkait atau penyediaan dana besar telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.
 - b. Laporan yang dimaksud tersebut telah disampaikan secara tepat waktu
- Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, laporan pelaksanaan GCG dan pelaporan internal
 - a. Laporan Tahunan telah disampaikan Bank secara tepat waktu kepada pemegang saham dan berbagai lembaga sesuai ketentuan.
 - b. Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi triwulan telah dimuat dan dipublikasikan secara tepat waktu melalui homepage bank dan surat kabar.
 - c. Laporan GCG telah mencerminkan kondisi yang sebenarnya dan dilengkapi dengan self assesment Bank serta cakupan isi laporan telah sesuai dengan peraturan yang berlaku.
 - d. Laporan Pelaksanaan GCG telah disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada pemegang saham dan berbagai lembaga yang berkepentingan'
 - e. Telah dipublikasikan melalui homepage bank secara tepat waktu
 - f. Pengaduan Nasabah Bank telah diselesaikan dengan baik
 - g. Bank menerapkan transparansi informasi mengenai produk dan penggunaan data pribadi nasabah
- Rencana Strategis Bank
 - a. Rencana Korporasi dan Rencana Bisnis disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Komisaris
 - b. Direksi telah mengkomunikasikan kepada pemegang saham pengendali melalui RUPS
 - c. Rencana bisnis bank telah menggambarkan pertumbuhan bank secara kesinambungan
 - d. Pertumbuhan Bank telah memberikan manfaat ekonomis dan non ekonomis bagi stakeholders
 - e. Rencana strategis bank telah disusun berdasarkan analisis SWOT
 - f. Rencana strategis Bank telah didukung dengan infrastruktur yang memadai

- g. Tidak terdapat intervensi pemilik terhadap pembagian keuntungan bank

Faktor-faktor negatif aspek *governance outcome* Bank adalah

- Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris
 - a. Dalam dokumentasi risalah rapat tidak terdapat pengungkapan perbedaan pendapat secara jelas.
 - b. Hasil rapat Dewan Komisaris, didokumentasikan dalam 1 file.
 - c. Hasil rapat Dewan Komisaris belum sepenuhnya merupakan rekomendasi dan/atau arahan yang dapat diimplementasikan oleh RUPS dan/atau Direksi.
 - d. Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan Anggota Dewan Komisaris dalam pengawasan Bank namun hasil dari peningkatan kemampuan tersebut belum diaplikasikan secara maksimal dalam bidang pengawasan
 - e. Pemilik modal utama PT. BPD Sultra merupakan Pemerintah Daerah sehingga memungkinkan terjadi intervensi pemilik modal terhadap komposisi dan atau/ pelaksanaan tugas Dewan Komisaris.
- Tugas dan Tanggung Jawab Direksi
 - a. Kebijakan bank yang bersifat strategis dibidang kepegawaian belum diungkapkan secara transparan melalui media yang dapat diakses oleh semua pegawai.
 - b. Arah bisnis bank telah dikomunikasikan kepada pegawai namun implementasinya belum optimal
 - c. Bank mengikutkan karyawan dalam pendidikan dan sertifikasi serta mengadakan pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kualitas karyawan namun belum merata kepada semua karyawan.
 - d. Pemilik modal utama PT. BPD Sultra merupakan Pemerintah Daerah sehingga memungkinkan terjadi intervensi pemilik terhadap komposisi dan atau/ pelaksanaan tugas Direksi
- Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite
 - a. Risalah rapat telah didokumentasikan dengan baik namun tidak menggambarkan adanya dissenting opinions.

- b. Anggota Komite telah melaksanakan fungsinya sesuai ketentuan yang berlaku namun belum maksimal
- Penanganan Benturan Kepentingan
 - Telah diungkapkan dalam setiap keputusan namun belum dituangkan dalam risalah rapat.
- Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank
 - a. Bank telah berusaha menurunkan pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku namun belum maksimal
 - b. Bank telah membangun budaya kepatuhan dalam pengambilan keputusan dan kegiatan operasional bank namun dalam pelaksanaannya belum maksimal
- Penerapan fungsi audit intern
 - a. Temuan pemeriksaan SKAI telah ditindaklanjuti namun masih terdapat beberapa temuan yang berulang.
 - b. Pelaksanaan program audit telah mempertimbangkan tingkat risiko dan program audit telah sesuai dengan prinsip SPFAIB namun jumlah auditor intern belum terpenuhi
- Penerapan manajemen risiko termasuk Sistem Pengendalian Intern
 - Bank telah memiliki kebijakan dan prosedur namun pelaksanaannya belum maksimal. Sehingga kedepan senantiasa akan menjadi perhatian.
- Rencana strategis Bank
 - Pemilik mampu dalam mengatasi kondisi permodalan bank yang memburuk namun kondisi tersebut belum dapat dibuktikan karena kondisi tersebut belum terjadi pada Bank

Demikian laporan pelaksanaan *Good Corporate Governance* pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara Tahun 2013, untuk diketahui.

Mengetahui :

DEWAN KOMISARIS
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SULAWESI TENGGARA

Kendari, 30 April 2014
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SULAWESI TENGGARA

JAHJA MALLISA

Komisaris

SUMA SANGGO

Komisaris

KHAERUL K. RADEN

Direktur Utama

L A U T U

Direktur Kepatuhan